



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana aksi daerah yang

menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara;

6. Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Daerah adalah Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara melalui surat keputusan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen –dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian target TPB yang selaras dan sejalan dengan periode RPJMD di Daerah;
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Mengoptimalkan dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian TPB agar lebih efektif, konkrit dan terarah

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB;
 - c. Bab III Kebijakan, Strategi dan Target Pencapaian TPB/SDGs;
 - d. Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Bab V Matriks Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah dan Non-Pemerintah;
 - f. Bab V Penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Daerah setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur;
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 September 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 21 September 2023

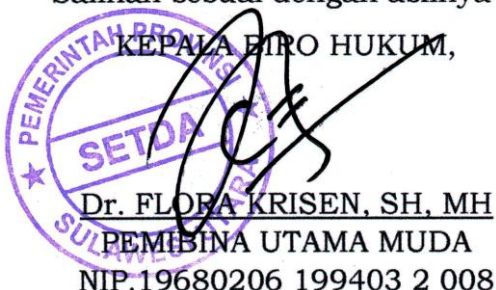
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE H. A. KEPEL
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pasal 5, mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah menyusun dan menetapkan RAD-TPB bersama bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional. Rencana Aksi ini yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menawarkan 17 Tujuan, 169 Target, dan 400 Indikator, namun demikian dalam proses penyusunan dokumen RAD terjadi transisi dari konteks global ke RAD-TPB Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua target dan indikator dapat diarusutamakan, diselaraskan, bahkan relevan dengan kondisi dan konteks kedaerahan, serta format dokumen perencanaan jangka menengah yang telah disusun. Proses transisi ini melalui beberapa analisis penyaring yang dimulai dengan kategori “kewenangan daerah/provinsi”. Kategori ini mewakili sistem otonomi, melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia. Kategori berikutnya adalah “indikator masih sulit diukur oleh daerah”. Kategori ini menggambarkan pentingnya alat ukur pencapaian setiap indikator sehingga ketika alat ukur tersebut tidak tersedia di level daerah, indikator tersebut tidak bisa diukur pencapaiannya. Kategori selanjutnya adalah “tidak atau kurang tersedianya data pendukung dalam penetapan target indikator di daerah”. Kategori ini menggambarkan kesulitan

yang selaras dengan kategori sebelumnya. Dengan kurangnya data pendukung, target capaian menjadi sukar untuk diukur. Saringan terakhir dalam proses transisi ini mengacu pada “indikator tidak selaras/sejalan dengan RPJMD dan Renstra Daerah.” Kategori ini menjadi saringan terpenting dan terakhir. Alasannya, kategori ini menggambarkan program-program yang telah ditata dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah mempunyai landasan dan kekuatan yuridis berdasarkan keputusan kepala daerah.

Proses transisi ini menghasilkan 17 Tujuan, 59 Target, dan 89 Indikator yang selaras dan relevan dengan kondisi dan konteks daerah dan, terutama kapasitas perencanaan dan penganggaran jangka menengah daerah, yaitu RPJMD dan Renstra OPD 2021-2026.

Dokumen “Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026” disusun melalui serangkaian proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari kementerian/lembaga, instansi vertikal, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media, akademisi dan pakar serta pemerintah daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan RAD-TPB ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat niyur melambai, bangsa Indonesia, serta sekaligus memberikan dukungan terhadap komitmen global.

Manado, Desember 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-3
1.3. Dasar Hukum Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-3
1.4. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026	I-4
1.5. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	I-8
1.6. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	I-8
1.7. Pembiayaan TPB/SDGs	I-10
1.8. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs	I-10
 BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	 II-1
2.1. Tujuan 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	II-1
2.2. Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II-9
2.3. Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II-16
2.4. Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	II-26
2.5. Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	II-31
2.6. Tujuan 6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	II-36
2.7. Tujuan 7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	II-41
2.8. Tujuan 8 Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	II-44
2.9. Tujuan 9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	II-53
2.10. Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara	II-59
2.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	II-62
2.12. Tujuan 12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	II-68
2.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	II-72
2.14. Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	II-76
2.15. Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	II-82
2.16. Tujuan 16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	II-84
2.17. Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	II-93

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	III-1
3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-1
3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-3
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-6
3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-10
3.5. Tujuan 5 Kesenjaraan Gender	III-13
3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Yang Layak	III-15
3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-17
3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-19
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	III-21
3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	III-23
3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	III-25
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab	III-27
3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-29
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-31
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-33
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	III-35
3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-38
3.18. Partisipasi Sektor Non-pemerintah	III-40
 BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	 IV-1
4.1. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)	IV-1
4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non-Pemerintah	IV-3
4.3. Alat Pemantauan dan Evaluasi	IV-4
4.4. Laporan Pencapaian TPB	IV-6
 BAB V : MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN NON-PEMERINTAH	 V-1
5.1. Matriks dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah	V-3
5.2. Matriks dukungan Program dan Kegiatan Non-Pemerintah	V-97
 BAB VI : PENUTUP	 VI-1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang oleh komunitas internasional disebut Sustainable Development Goals (SDGs), seyogianya wajib dilaksanakan oleh seluruh bangsa di dunia, bukan saja negara-negara berkembang namun juga negara-negara maju. Indonesia termasuk didalamnya yang berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pencapaiannya pada tahun 2030 di seluruh tanah air sampai ke pelosok negeri.

TPB/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan, serta disparitas capaian target antarprovinsi yang masih lebar.



Dalam upaya mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2030, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden dimaksud adalah bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*; pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan dengan menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode berjalan; berdasarkan dekade aksi (*Decade of Action*) pelaksanaan TPB telah memasuki 10 (sepuluh) tahun sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah

Selanjutnya, berdasarkan arahan Perpres 111 Tahun 2022, bahwa Gubernur Menyusun RAD-TPB 5 tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, pakar, media dan pihak terkait lainnya, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan RAD tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs

Arahan percepatan pelaksanaan TPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dimaksud diatas telah menetapkan indikator dan target sasaran Edisi ke-II sampai tahun 2024. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun RAD TPB periode 2022-2026 tetap akan memperhatikan target sasaran sebagaimana diatur dalam peraturan presiden, dengan pertimbangan utama tetap menyesuaikan dan menyelaraskan target pembangunan yang diatur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2026.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selaras dan sejalan dengan periode RPJMD di daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Mengoptimalkan dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar lebih efektif, konkrit dan terarah sejalan dengan periode RPJMD di daerah.

1.3. Dasar Hukum Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 6) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 7) Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 11) Kepmendagri No. 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



- 12) Kepmen PPN/Bappenas No. 136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2024;
- 13) Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sulut Tahun 2021-2026;

1.4. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah agenda pembangunan global yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola serta mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/*SDGs* mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 17 Tujuan tersebut disajikan pada gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)

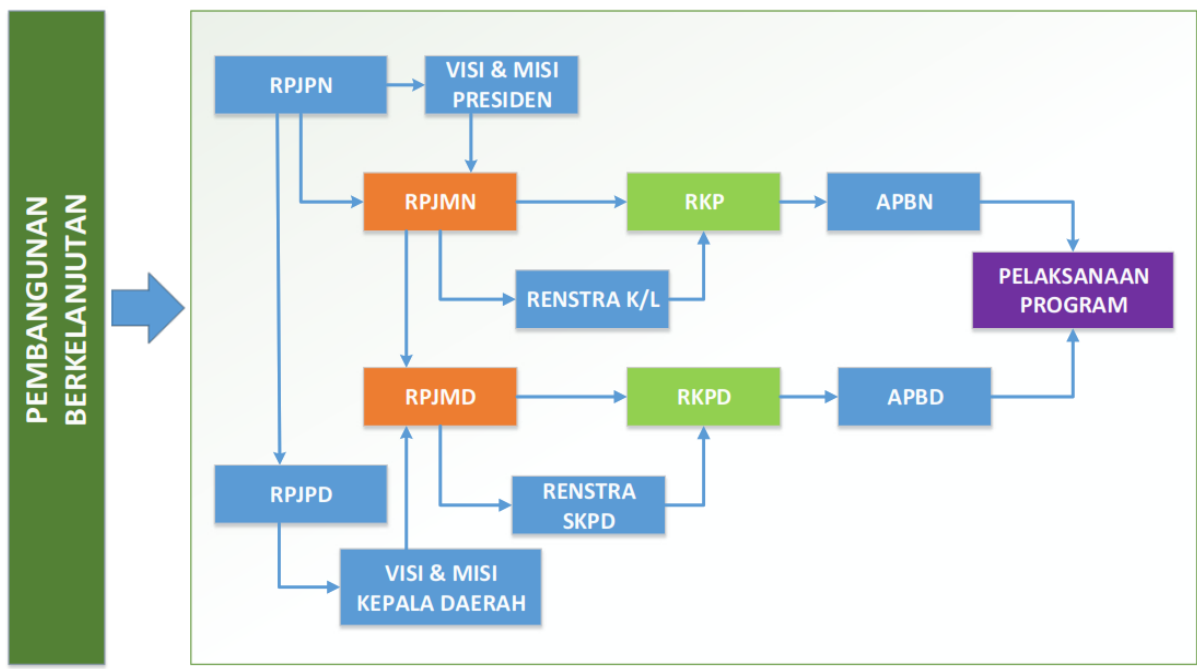


Adapun TPB/*SDGs* menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Upaya pencapaian target TPB/*SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



Pengarusutamaan TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.

Gambar 2. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) menjaga kesinambungan antara Prioritas pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026; (2) memastikan konsistensi antara perencanaan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) pada program prioritas tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dan pinjaman bank daerah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; (4) mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan Misi, Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. 5 Misi, 5 Tujuan dan 5 Sasaran Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi pertama ini bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Prevalensi Stunting dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

2. Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

Misi kedua ini bertujuan untuk “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini (*Gini Ratio*), Persentase Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3. Misi 3: Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas.

Misi ketiga ini bertujuan untuk “Terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Infrastruktur.

4. Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.

Misi keempat ini bertujuan untuk “Mewujudkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak.

5. Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.

Misi kelima ini bertujuan untuk “Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Opini BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistim Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE).



Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan dan sinkronisasi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara, maka 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diselaraskan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Penyelarasan tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 1. Penyelarasan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026.

MISI	TUJUAN	SASARAN	17 TPB/SDGs
MISI I: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 2: Tanpa Kelaparan
			Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas
			Tujuan 5: Kesenjaraan Gender
			Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan
MISI II: Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan
			Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
			Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur
			Tujuan 14: Ekosistem Lautan
			Tujuan 15: Ekosistem Daratan
MISI III: Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
			Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau
			Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
MISI IV: Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
			Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim
MISI V: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
			Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan



1.5. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen dalam pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah nasional dan dunia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia khususnya di Sulawesi Utara yang terefleksi dari sinergitas antara, TPB/SDGs dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, namun juga merupakan wujud kontribusi Sulawesi Utara bagi komunitas global.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Nomor 296 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2026 serta Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara 2022 - 2026. Peraturan Gubernur tersebut menegaskan bahwa Gubernur sebagai koordinator melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026 serta menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

1.6. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

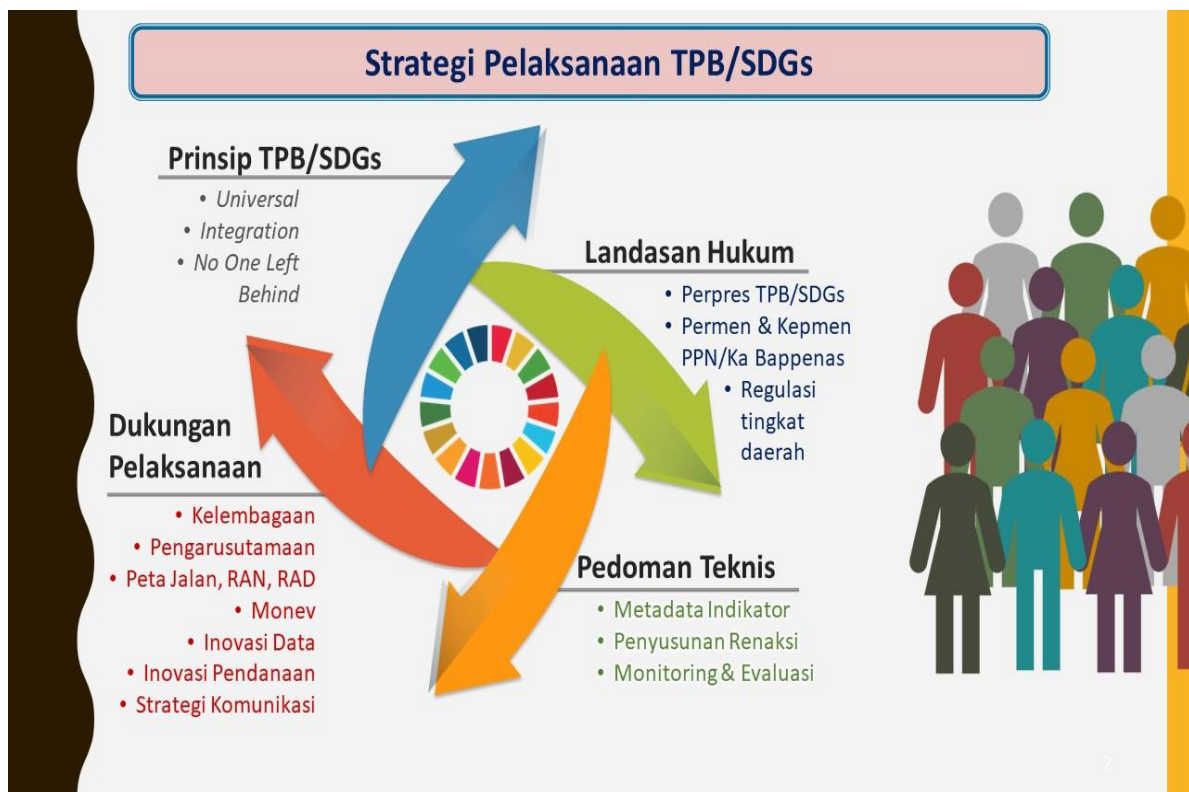
TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah *"No one left behind"* atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal".

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil dan media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Organisasi kemasyarakatan serta media atau yang dikenal juga dengan istilah partisipasi *triple helix*, *quadruple helix* dan *penta helix*.

Aksi bersama atau kolaborasi disertai dengan koordinasi, komunikasi dan komitmen yang konsisten dari para pihak baik pemerintah maupun non pemerintah menjadi keniscayaan dalam mewujudkan TPB/SDGs yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).



Gambar 3. Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs



Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Sedangkan peran media adalah mendiseminasikan, mensosialisasikan, dan mengedukasi melalui informasi yang akurat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan.

Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.7. Pembiayaan TPB/SDGs

Sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs akan terus dioptimalkan, salah satunya melalui penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Adapun sumber pembiayaan pelaksanaan TPB/SDGs lainnya juga akan terus dioptimalkan diantaranya melalui kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan nonpemerintah, masyarakat, dan filantropi. Perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyaknya institusi yang berderma dan menolong sesama. Baik berbasis keagamaan dan keluarga, dana sosial keagamaan misalnya melalui **zakat, infaq, shadaqah, perpuluhan, kolekte** dan **dana punia** yang memiliki potensi yang sangat besar serta melalui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang saat ini terus berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility” yang menjadi pedoman bersifat sukarela mengenai tanggungjawab sosial institusi, serta terkait dengan TPB/SDGs.

1.8. Sistematisasi Rencana Aksi TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026 terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang Pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB, prinsip-prinsip pelaksanaan TPB, pembiayaan TPB dan sistematisasi Rencana Aksi Daerah TPB.

Bab kedua tentang Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2021 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB hingga tahun 2026.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan kebijakan, strategi dan target pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian TPB yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB 2022-2026.

Bab kelima menyajikan matriks dukungan program dan kegiatan pemerintah dan non-pemerintah dalam pencapaian RAD TPB 2022-2026.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD



BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TARGET

PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 5 target yang diukur melalui 5 indikator dalam mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 1 adalah Percepatan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, melalui 5 nilai manfaat, yakni Mengurangi beban pengeluaran masyarakat secara berkelanjutan, Memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk layanan dasar, Meningkatkan pendapatan yang memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan, Meningkatkan modal manusia sesuai dengan karakteristik Kemiskinan dan Memanfaatkan Modal Wilayah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Peningkatan sinergi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya;
- 2) Penyediaan data rumah tangga miskin by name by address yang secara berkala terus diperbaharui dan divalidasi serta digunakan oleh semua lintas sektor terkait;
- 3) Mengentaskan kemiskinan ekstrim;
- 4) Menerapkan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, kelompok miskin dan rentan;
- 5) Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar; dan
- 6) Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.



Tabel 3.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1: Tanpa kemiskinan									
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim/(Persentase Kemiskinan)	BPS	Persen	(a). 1,87; (b). 7,28	(a). 1,02; (b). 7,5–6,9	(a). 0,5; (b). 5,93	(a). 0; (b). 5,65	(a). 0; (b). 5,37	(a). 0; (b). 5,09
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan / (Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan)	Dinas Kesehatan Daerah	Persen	91,11	94	96	98	98	98
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	BPS (air minum dan sanitasi)	Persen	Akses Air Minum Layak = 91,65%; dan Akses Sanitasi Layak = 81,65%	Akses Air Minum Layak = 92%; dan Akses Sanitasi Layak = 85%	Akses Air Minum Layak = 94%; dan dan Akses Sanitasi Layak = 87%	Akses Air Minum Layak = 96%; dan Akses Sanitasi Layak = 89%	Akses Air Minum Layak = 98%; dan Akses Sanitasi Layak = 91%	Akses Air Minum Layak = 100%; dan Akses Sanitasi Layak = 93%
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB	Jumlah	1485,69	NA	NA	NA	NA	NA
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Dinkes dan Dikda	Persen	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah tanpa kelaparan. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 4 target yang diukur melalui 7 indikator dalam mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman dan bergizi;
- 2) Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula;
- 3) Meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian;
- 4) Memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi harga pangan yang ekstrim; dan
- 5) Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman, serta Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial).





Tabel 3.2 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 2. Tanpa kelaparan									
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS	Persen	6,91	6	5,5	5	5	5
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ (Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan)	Dinas Pangan Daerah	Persen	14,03	12,03	10,03	8,03	6,03	4,03
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	BPS	Persen	21,6	16,2	15	14	13	12
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	BPS	Persen	7,1	7,1	7	7	6,8	6,8
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)/(Skor Pola Pangan Harapan)	Dinas Pangan Daerah	Nilai	83,1	94,5	94,7	95	95	95
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.									



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor/(Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya)	BPS	Nilai	NTPP=104,83; NTPH=102,33; NTPNAK=103,28; NTP Perkebunan=114,48; NTNP= 104;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 93-100; NTNP= 104;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 94-100; NTNP= 105;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 95-100; NTNP= 106;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 95-100; NTNP= 107;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 95-100; NTNP= 108;
Target 2.c Mengadopsi langkahlangkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.									
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan/(Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan)	Dinas Pangan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1



3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 7 target yang diukur melalui 17 indikator dalam mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 3 adalah Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak dan remaja serta meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian (promotif dan preventif) penyakit dan penyehatan lingkungan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Mengurangi rasio angka kematian ibu;
- 2) Menekan kematian bayi baru lahir, Kematian Neonatal dan Kematian Balita;
- 3) Mengurangi epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya;
- 4) Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan;
- 5) Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana;
- 6) Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang;
- 7) Menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau bagi semua orang; dan
- 8) Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.



Tabel 3.3 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera									
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan Daerah	Angka	173	150	125	100	75	50
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan Daerah	Persen	(a) = 95%; (b) = 89,91%	(a) = 97%; (b) = 91%	(a) = 98%; (b) = 92%	(a) = 99%; (b) = 93%	(a) = 100%; (b) = 94%	(a) = 100%; (b) = 95%
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	a. Angka Kematian Balita (AKBa); b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Daerah	Jumlah	a. 6; b. 5	a. 6; b. 5	a. 5; b. 4	a. 5; b. 4	a. 4; b. 3	a. 4; b. 3
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Daerah	Jumlah	4	4	3	3	2	2
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi/ (Cakupan Orang dengan HIV Aids (ODHA) dalam pengobatan ARV)	Dinas Kesehatan Daerah	Persen	28	30	30	35	40	45
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk/(Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC)	Dinas Kesehatan Daerah	Persen	82	84	84	86	88	90
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan Daerah	Persen	0,35	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan Daerah	Jumlah Kab/Kota	13	13	13	14	15	15

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun/(Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR))	Dinas Kesehatan	Persen	3	3	6	9	12	15
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	33,12	31	29	27	25	23
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi Status Gizi Berdasarkan Kategori IMT pada Penduduk dewasa (umur >18 tahun), Riskesdas 2018	%	21,8	21	20.5	20	19.5	19
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern/(Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	BPS	Persen	62,5	62,5	65	67	69	71
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama/(Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19))	BPS	Persen	30	30	30	29,8	29,8	29,6
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BPS	Nilai	2.25	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	BPS	Persen	8,76	8,76	8,50	8,45	8,40	8,37
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/(Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan)	DInas Kesehatan Daerah	%	91.11	94	96	98	98	98



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional/(Persentase Kab/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap)	Dlnas Kesehatan Daerah	Persen	33	67	80	87	93	100
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan/(Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan obat esensial)	Dlnas Kesehatan Daerah	%	79,3	85	90	85	100	100
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan Daerah	Angka	6,24	6,80	7,40	8	8,60	9,20



3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah Pendidikan berkualitas. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator dalam mencapai tujuan pendidikan berkualitas pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 4 adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui;

- 1) Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
- 2) Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
- 3) Menekan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan;
- 4) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi;
- 5) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
- 6) Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas sesuai standar dan mutu pendidikan; dan
- 7) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah.



Tabel 3.4 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas									
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	BPS	Persen	SD/ Sederajat= 96,1; SMP/ Sederajat= 91,05; SMA/ Sederajat= 68,56;	SD/ Sederajat= 96,5; SMP/ Sederajat= 91,5; SMA/ Sederajat= 70;	SD/ Sederajat= 97; SMP/ Sederajat= 92; SMA/ Sederajat= 71;	SD/ Sederajat= 97,5; SMP/ Sederajat= 92,5; SMA/ Sederajat= 72;	SD/ Sederajat= 98; SMP/ Sederajat= 93; SMA/ Sederajat= 73;	SD/ Sederajat= 98,5; SMP/ Sederajat= 93,5; SMA/ Sederajat= 74;
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat/((a).Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-6 Tahun; (b).Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-12 Tahun; (c). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 13-15 Tahun; (d). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 16-18 Tahun	BPS	Persen	(a)= 28,61; (b)= 99,37; (c)= 95,41; (d)= 73,86;	(a)= 29,20; (b)= 99,40; (c)= 95,60; (d)= 74,00;	(a)= 29,60; (b)= 99,43; (c)= 96,80; (d)= 74,20;	(a)= 30,00; (b)= 99,46; (c)= 97,00; (d)= 74,40;	(a)= 30,20; (b)= 99,49; (c)= 97,20; (d)= 74,60;	(a)= 30,60; (b)= 99,52; (c)= 97,40; (d)= 74,80;
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	BPS	Persen	96,06	96,30	96,60	96,90	97,20	97,50

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/Sederajat, dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas/	BPS	Persen	APM SD/Sederajat= 95,39; APM SMP/Sederajat= 74,94; APM SMA/Sederajat= 63,33; APK SD/Sederajat= 106,56; APK SMP/Sederajat= 90,45; APK SMA/Sederajat= 86,17;	APM SD/Sederajat= 95,60; APM SMP/Sederajat= 75,30; APM SMA/Sederajat= 63,80; APK SD/Sederajat= 106,90; APK SMP/Sederajat= 90,65; APK SMA/Sederajat= 86,30;	APM SD/Sederajat= 95,80; APM SMP/Sederajat= 75,60; APM SMA/Sederajat= 64,10; APK SD/Sederajat= 107,20; APK SMP/Sederajat= 90,85; APK SMA/Sederajat= 86,60;	APM SD/Sederajat= 96,00; APM SMP/Sederajat= 75,90; APM SMA/Sederajat= 64,50; APK SD/Sederajat= 107,50; APK SMP/Sederajat= 91,05; APK SMA/Sederajat= 86,90;	APM SD/Sederajat= 96,20; APM SMP/Sederajat= 76,10; APM SMA/Sederajat= 65,20; APK SD/Sederajat= 107,80; APK SMP/Sederajat= 91,25; APK SMA/Sederajat= 87,10;	APM SD/Sederajat= 96,40; APM SMP/Sederajat= 76,30; APM SMA/Sederajat= 65,70; APK SD/Sederajat= 108,10; APK SMP/Sederajat= 91,45; APK SMA/Sederajat= 87,40;
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Persen	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	BPS	Persen	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=34,5%; SD=92,9%; SMP=96%; SMA=98,5%; SMK=95,5%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=35%; SD=93,2%; SMP=96,2%; SMA=98,6%; SMK=95,7%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=35,5%; SD=93,5%; SMP=96,5%; SMA=98,7%; SMK=95,9%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=36%; SD=93,8%; SMP=96,8%; SMA=98,8%; SMK=96,1%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=36,5%; SD=94,1%; SMP=97,1%; SMA=98,9%; SMK=96,3%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=37%; SD=94,4%; SMP=97,5%; SMA=99%; SMK=96,5%



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 2 target yang diukur melalui 3 indikator dalam mencapai tujuan kesetaraan gender pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 5 adalah Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesetaraan gender untuk mendapatkan manfaat yang sama, setara, layak bagi laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
- 2) Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
- 3) Memberikan akses yang setara kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan layanan dasar serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin termasuk kaum rentan (kepala RT perempuan, anak, lansia, difabel, ibu hamil);
- 4) Memberikan peluang yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam meningkatkan modal manusia, pemberdayaan serta pendapatan yang lebih baik;
- 5) Menyediakan fasilitas dan layanan publik yang layak, aman dan ramah bagi masyarakat kaum rentan (perempuan, anak, lansia, difabel, ibu hamil dan ibu menyusui);
- 6) Memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk dapat berpartisipasi, ikutserta atau terlibat dalam kegiatan atau pengambilan keputusan yang responsif gender; dan
- 7) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak.



Tabel 3.5 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 5 Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 5. Kesetaraan gender									
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir/(a). Jumlah Kasus & Korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) Dewasa; (b). Jumlah Kasus & Korban Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Dinas P3A	Jumlah	(a). 201 dan 197; (b). 465 dan 440;	(a). 180 dan 175; (b). 425 dan 400;	(a). 160 dan 155; (b). 380 dan 360;	(a). 140 dan 135; (b). 340 dan 320;	(a). 120 dan 115; (b). 300 dan 280;	(a). 100 dan 90; (b). 250 dan 230;
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir/Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Dinas P3A	Indeks	0,71	0,71	0,65	0,60	0,55	0,5
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas P3A	Indeks	79,07	79,09	80,1	80,12	80,14	80,16

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator dalam mencapai tujuan air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 6 adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat serta kualitas permukiman.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua;
- 2) Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan;
- 3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman; dan
- 4) Mendorong implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Tabel 3.6 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak									
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman/(Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layana Sumber Air Minum Layak)	BPS	Persen	91,65	92	94	96	98	100
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun/(Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak)	BPS	Persen	81,65	85	87	89	91	93
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah (Data hasil pemantauan)	Sungai/ Danau	5	1	1	1	1	1

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 TPB/SDGs adalah menjamin energi bersih dan terjangkau. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 1 target yang diukur melalui 1 indikator dalam mencapai tujuan energi bersih dan terjangkau pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 7 adalah pemenuhan akses energi, pasokan energi, dan tenaga listrik yang terjangkau, merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern;
- 2) Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan;
- 3) Optimalisasi konsumsi energi;
- 4) Penyediaan dan pemerataan akses layanan energi terjangkau.



Tabel 3.7 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau									
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	BPS	Persen	99,99	100	100	100	100	100



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Tujuan 8 TPB/SDGs adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator dalam mencapai tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030.

Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 8 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang inklusif dan berkelanjutan;
- 2) Mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas;
- 3) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja;
- 4) Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya; dan
- 5) Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.



Tabel 3.8 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi									
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	Persen	4,16	4,5-5,5	5-5,7	5,7-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0
8.1.1.(a)	PDB per kapita / (PDRB Per Kapita)	BPS	Rp. Juta	54	56	60	65	70	76
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur/(Tingkat Pengangguran Terbuka)	BPS	Persen	7,06	6,47 - 7,18	6,00 - 6,50	5,50 - 6,00	5,00 - 5,50	4,50 - 5,00
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perusahaan	100	150	200	250	300	350
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara/(Jumlah Kunjungan Wisman)	BPS	Orang	15239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS	Orang	15.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 TPB/SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 1 target yang diukur melalui 1 indikator dalam mencapai tujuan industri, inovasi dan infrastruktur pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 9 adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui;

- 1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua



Tabel 3.9 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur									
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional/(Rasio Kemantapa Jalan Provinsi)	Dinas PU; BPJN Sulut	Rasio	0,89	0,894	0,899	0,903	0,908	0,912



3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 TPB/SDGs adalah mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 1 target yang diukur melalui 3 indikator dalam mencapai tujuan berkurangnya kesenjangan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 10 adalah mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk serta mengurangi jumlah desa tertinggal.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional;
- 2) Peningkatan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi; dan
- 3) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.



Tabel 3.10 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan									
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Rasio Gini.	BPS	Rasio	0,367	0,360	0,355	0,350	0,345	0,340
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal/(Persentase pengentasan desa tertinggal)	DPMDD	Persen	56	64	66	68	70	72
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri/(Prentase peningkatan status desa mandiri)	DPMDD	%	10,93	14,43	17,93	21,43	24,93	28,43

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 7 target yang diukur melalui 8 indikator dalam mencapai tujuan kota dan pemukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 11 adalah secara bertahap mengurangi kawasan kumuh serta mencegah munculnya kawasan kumuh baru, utamanya di wilayah perkotaan serta mendorong terciptanya kota yang layak huni.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh;
- 2) Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua;
- 3) secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDRB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan;
- 4) Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota;
- 5) Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;
- 6) Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
- 7) Membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.



Tabel 3.11 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan									
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	69,5	72	74	76	78	80
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	Dinas Perhubungan Daerah	Persen	73,33	73,83	74,33	74,83	75,33	75,83
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB	Jumlah	1485,69	NA	NA	NA	NA	NA
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah; SIPSN	Ton	40%	45%	50%	60%	70%	100%
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	DLHD dan KLHK	IKU (Indeks Kualitas Udara)	100	90,983	90,984	90,986	90,988	90,99
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Dinas PUPRD	Persen	20	20	20	20	20	20
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah									
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.	Dinas PUPRD; DLHD	Persen	100	100	100	100	100	100
Target 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.									
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	Dinas PUPRD	%	100	100	100	100	100	100

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab



Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 2 target yang diukur melalui 2 indikator dalam mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030.

Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 12 adalah penerapan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen; dan
- 2) Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan.



Tabel 3.12 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab									
Target 12.3 12.4 Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.	SIPSN	Persen	35.06	36.06	37.06	38.06	39.06	40.06
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya/(Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota)	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 2 target yang diukur melalui 2 indikator dalam mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 13 adalah Penurunan emisi GRK serta Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam;
- 2) Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional;
- 3) Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim;
- 4) Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis (termasuk hutan);
- 5) Peningkatan bauran energi baru terbarukan dalam konsumsi energi.



Tabel 3.13 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 13. Perubahan iklim									
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jumlah	1485,69	NA	NA	NA	NA	NA
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.	BPS, BPPIKHL, DLH 15 Kab/Kota, Dinas Kehutanan , Dinas pertanian dan peternakan, Dinas Perindustrian, Pertamina, PLN, PT CONCH	%	50	60	70	80	90	100

3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah ekosistem lautan. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 4 target yang diukur melalui 5 indikator dalam mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi;
- 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif;
- 3) Secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya;
- 4) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; dan
- 5) Revitalisasi ekosistem laut melalui penanaman mangrove, perbaikan ekosistem karang serta padang lamun.



Tabel 3.14 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 14. Ekosistem lautan									
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi									
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbangun ke laut.	DKPD; DLHD	Pendataan	Belum Terdata	Belum Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata
Target 14.2 Pada tahun 2030, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya									
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman/jumlah total produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan (pud) dari seluruh kab/kota di wilayah prov sulut	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut/(Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	hektar	164.251,94	190.776,81	234.886,92	234.886,92	234.886,92	234.886,92



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah ekosistem daratan. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator dalam mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global; dan
- 3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.



Tabel 3.15 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 15. Ekosistem daratan									
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan/(Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat)	Dinas Kehutanan	Ha	2368	2368	2368	2368	2368	2368
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk kategori maju/(Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi))	Dinas Kehutanan	Persen	30	29	28	27	26	25
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan/(Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis)	Dinas Kehutanan	Ha	1325	600	600	600	600	600
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan									
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.	Dinas Kehutanan	Situs	• Cagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batu Angus; • Taman wisata alam batu putih dan batu Angus; • Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; • Suaka marga satwa manembo-nembo;	• Cagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batu Angus; • Taman wisata alam batu putih dan batu Angus; • Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; • Suaka marga satwa manembo-nembo;	• Cagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batu Angus; • Taman wisata alam batu putih dan batu Angus; • Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; • Suaka marga satwa manembo-nembo;	• Cagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batu Angus; • Taman wisata alam batu putih dan batu Angus; • Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; • Suaka marga satwa manembo-nembo;	• Cagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batu Angus; • Taman wisata alam batu putih dan batu Angus; • Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; • Suaka marga satwa manembo-nembo;	• Cagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batu Angus; • Taman wisata alam batu putih dan batu Angus; • Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; • Suaka marga satwa manembo-nembo;

3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



Tujuan 16 TPB/SDGs adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 4 target yang diukur melalui 8 indikator dalam mencapai tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh pada tahun 2030.

Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 16 adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions).

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Mengurangi kasus perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak;
- 2) Memastikan proses pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan;
- 3) memastikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran; dan
- 4) Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar.



Tabel 3.16 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh									
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Dinas P3A	Persen	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Dinas P3A	Angka	0,71	0,71	0,65	0,6	0,55	0,55
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi/(Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kepolisian Resort dan Kepolisian Daerah)	Polda	Angka	7140	NA	NA	NA	NA	NA
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B/(Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi)	Inspektorat	NILAI	BB	BB	BB	BB	BB	BB
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B/(Indeks Reformasi Birokrasi)	PAN RB	NILAI	57,48	59,95	61,00	62,50	64,00	65,00
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik/(Indeks Pelayanan Publik)	Setda	NILAI	7,81	7,81	7,91	8,01	8,11	8,21
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS	Persen	26,65	26,65	26,65	26,65	30	30
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur/(Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran)	Disdukcapil dan KB; Susenas Maret 2021	%	73.34	73.34	74	74,34	75	75,34

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil dan KB; Susenas Maret 2021	Persen	90,15	90,15	92,15	93,15	94,15	95,15
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	BPS	Jumlah	Belum Terdata	Belum Terdata	Belum Terdata	Terdata	Terdata	Terdata
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DP3A	Kasus	529	NA	NA	NA	NA	NA
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	DKIPS	Kasus	20	20	20	20	20	20



3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 TPB/SDGs adalah pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 1 target yang diukur melalui 1 indikator dalam mencapai tujuan kemitraan untuk mencapai Tujuan pada tahun 2030.



Kebijakan yang diarahkan dalam pencapaian Tujuan 17 adalah Membangun Kerjasama multipihak antara pemerintah, swasta, akademisi, media dan non-pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif dan berkelanjutan;
- 2) Mengoptimalkan forum Tim Koordinasi Daerah dan forum CSR/TJSL yang melibatkan para stakeholder;
- 3) Mendukung penyediaan data yang berkualitas, tepat waktu, dapat dipercaya, dan terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional maupun daerah.



Tabel 3.17 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan									
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional									
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	Persen	97,25	100	100	100	100	100



3.18 Partisipasi Sektor Non-pemerintah

Bulan September 2015 menandai satu titik dalam linieritas waktu di mana negara-negara mengadopsi Agenda 2030 dan 17 Pembangunan Berkelanjutan Tujuan (SDGs). Pembukaan Agenda 2030 memang terkesan ambisius, universal, dan tak terpisahkan dengan menegaskan: “Semua negara dan semua pemangku kepentingan, bertindak dalam kemitraan kolaboratif, akan mengimplementasikan rencana ini.” Penegasan ini mengemuka dalam Sidang Umum PBB, 2015. Tujuan 17 mempromosikan kemitraan baru yang bersifat global antarpemerintah tetapi juga antara pemerintah dan aktor nonpemerintah.

Proses mengadopsi partisipasi sektor ini tidak berjalan mulus. Tantangan yang paling menganga tak lain terletak pada kejelasan makna dan bentuk baru dari kemitraan dan peran berbagai aktor nonpemerintah. Tuntutan akan nilai akuntabilitas dan desakan rekanan seharusnya menjadi mekanisme kunci yang akan mendorong transisi dari internasional komitmen terhadap pelaksanaan nyata aksi pada skala nasional dan lokal. Maksudnya, tanggung jawab sosial semua pihak terhadap kelestarian manusia dan dunia dan tindakan-tindakan para pelopor yang telah memulai gerakan ini seyogianya mempercepat implementasi Tujuan-Tujuan global di segala level, terutama di level nasional dan daerah.

Selain wujud partisipasi nonpemerintah yang terkadang belum jelas peran mereka juga masih belum terdefinisi dengan cermat: Apakah lembaga nonpemerintah, contohnya LSM, seharusnya menjadi pengawas implementasi semata? Apakah mereka memiliki sumber daya dan legitimasi untuk melakukannya? Bagaimana bentuk partisipasi nonpemerintah dalam pelaksanaan Agenda 2030? Organisasi global dan pemerintah nasional/lokal memang berharap banyak dari pihak nonpemerintah. Sayangnya, mereka sendiri tidak secara jelas mengungkapkan harapan mereka. Lantas, apa sebenarnya peran nonpemerintah? Bagaimana mereka dapat berkontribusi pada SDGs? Bagaimana kemitraan mereka dengan pemerintah baik di level nasional maupun di level lokal? Apakah kemitraan mereka berkembang dan menunjukkan benih-benih menjanjikan? Kesulitan ini semakin meruncing ketika prinsip tata kelola umum diterapkan untuk mengukur partisipasi sektor nonpemerintah. Apa wujud perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, termasuk ukuran terhadap capaian target partisipasi terhadap capaian target global berbasis indikator-indikator SDG's?.

PBB mendefinisikan sektor nonpemerintah sebagai “setiap kelompok warga negara sukarela yang nirlaba yang dibentuk pada level komunitas lokal, tingkat nasional atau internasional. Berorientasi pada tugas dan terdorong orang-orang dengan minat sama, sektor ini memberi berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keprihatinan warga negara



kepada Pemerintah, mengadvokasi dan memantau kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat.”

Agenda 2030 adalah agenda global tetapi implementasinya harus diterjemahkan secara nasional ke semua pihak sektor kegiatan yang berbeda. Untuk alasan ini, setiap partisipasi seharusnya terimplementasi sampai ke level mikro, yakni setiap individu sebagai target setiap indikator yang relevan.

Tingkat kesadaran global masih beragam tentang signifikansi dari SDG's, apalagi tentang peran dan makna partisipasi lembaga nonpemerintah. *Mutatis mutandis*, kondisi ini juga dialami di Indonesia secara nasional dan Provinsi Sulawesi Utara secara lokal. Provinsi Sulawesi Utara kini telah memasuki RAD TPB generasi kedua setelah RAD TPB 2018-2021. Dalam RAD generasi pertama ini, partisipasi nonpemerintah disadari dan dibutuhkan namun belum dapat terdefinisi dan teraktualisasi dengan baik. Berangkat dari kesadaran ini, RAD TPB 2022-2026 hendak melibatkan secara lebih konkret sektor nonpemerintah. Konkretisasi partisipasi sektor ini pada pencapaian target setiap indikator yang relevan telah diakomodasi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dengan cara menawarkan program-program riil berdasarkan perencanaan jangka menengah daerah. Program-program ini dipertajam dengan analisis kemanfaatannya sehingga setiap pemangku kepentingan secara leluasa dan mandiri menentukan keterlibatan mereka dan menetapkan target capaian mereka dengan merujuk pada indikator-indikator yang tersedia dan terseleksi di tingkat daerah/provinsi.

Tawaran ini disampaikan dalam bentuk Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nonpemerintah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Detail rekomendasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Bappeda Provinsi Sulawesi Utara mengajukan rekomendasi tawaran untuk berpartisipasi ini dalam sebuah diskusi kelompok terpusat (DKT). DKT ini menghadirkan beberapa instansi yang mewakili sektor nonpemerintah. Dalam diskusi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bappeda Provinsi, mengajak sektor nonpemerintah untuk berpartisipasi secara aktif, strategis dan selaras dengan perencanaan provinsi. Tawaran ini dijawab positif oleh beberapa instansi dan menyelaraskan program mereka dengan rekomendasi program-program SDG's yang telah dianalisis berdasarkan empat asas kemanfaatan. Asas-asas itu mencakup mengurangi beban pengeluaran masyarakat secara berkelanjutan, memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk layanan dasar, meningkatkan pendapatan yang memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan, meningkatkan modal manusia, dan memanfaatkan modal wilayah.

Instansi-instansi yang turut menyelaraskan program-program mereka meliputi: Cargill Indonesia (Tujuan 6, 9, 12, 14, 4 kegiatan), Rare Indonesia (Tujuan 14, 3 Kegiatan), PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sam Ratulangi (Tujuan 11, 1 kegiatan), PT Bank SulutGo (Tujuan 6, 1 kegiatan), PT Pegadaian Kanwil Manado (Tujuan 11 dan 15, 1 kegiatan), Bank BRI Wilayah Manado (Tujuan 5 dan 17, 3 kegiatan), Yayasan Bumi Tangguh (Tujuan 14, 1 kegiatan), Suara Parangpuang (Tujuan 5, 1 kegiatan), dan Yapeka Sulawesi Utara (Tujuan 1 dan 14, 27 kegiatan).

RPD TPD 2022-2026 ini merekam kegiatan-kegiatan sektor nonpemerintah dan menyelaraskannya dengan pencapaian Tujuan-Tujuan global ini secara umum. Ukuran dari kegiatan-kegiatan ini masih pada unsur "keterlaksanaan". Konsekuensinya, masih sukar untuk mengukur kontribusi kegiatan-kegiatan ini terhadap target capaian daerah terhadap setiap indikator TPD yang telah dipilih dan diselaraskan dengan program jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara.



BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 Peraturan Presiden 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 15 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

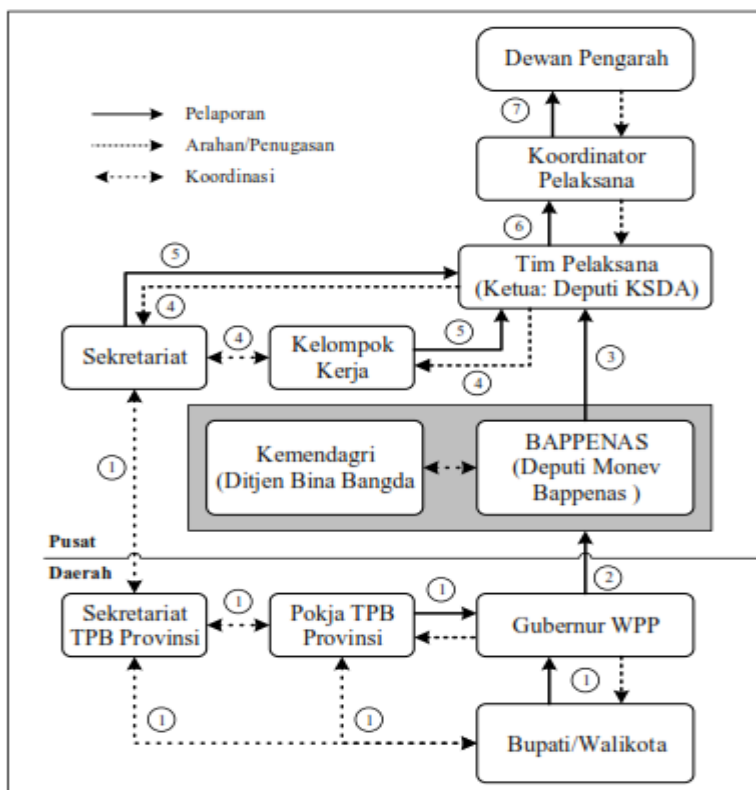
Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.1 Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 3 ayat 2 Perpres 111/2022. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 15 ayat 2 Perpres 111/2022.



Gambar 1. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs



Adapun penjelasan alur pemantauan RAD TPB/SDGs berdasarkan Peraturan Presiden 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Langkah 1).
2. **Gubernur** selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (Langkah 3).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).

6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (Langkah 7).

Berdasarkan 7 langkah pemantauan diatas, ruang lingkup RAD TPB/SDGs ada pada poin 1 dan poin 2.

Selanjutnya secara teknis, kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencapaian TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset dengan ketentuan sebagai berikut:

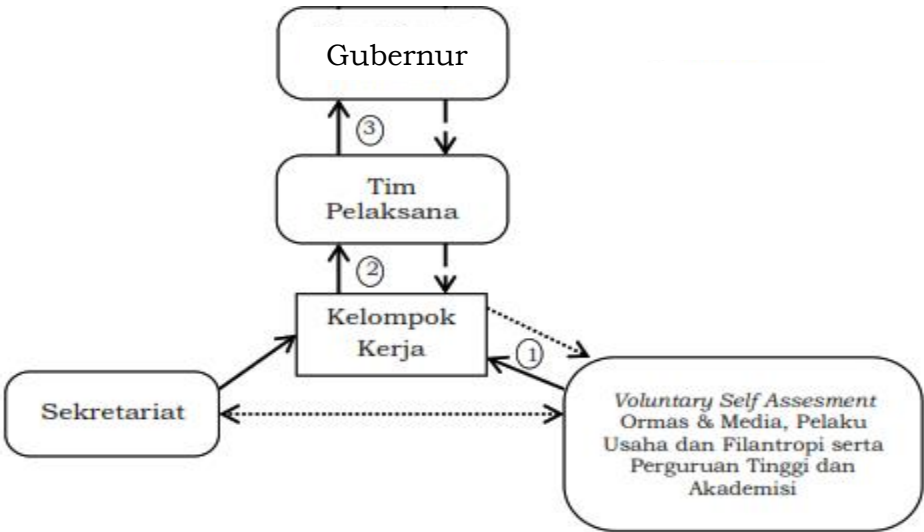
- 1) Masing-masing perangkat daerah di lingkup provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga teknis lainnya di daerah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGs secara mandiri sesuai dengan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui bappeda/bapelitbangda melakukan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan perangkat daerah serta lembaga teknis lainnya di wilayahnya masing-masing melalui pertemuan dan evaluasi rutin pencapaian TPB/SDGs;
- 3) Pemerintah Provinsi melalui bappeda melakukan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota serta lembaga teknis lainnya di wilayahnya melalui pertemuan dan evaluasi rutin pencapaian TPB/SDGs;

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non-Pemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 2. Alur Informasi Pemantauan Organisasi nonPemerintah



Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Organisasi nonpemerintah** melakukan *voluntary self assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. **Kelompok Kerja** dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. **Ketua Tim Pelaksana** kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana** melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.3 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:



4.3.1 Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

Tabel 1. Pengisian formulir evaluasi

Nama Tujuan SDGs (1)							
Nama Target SDGs (2)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)

Simbol	Keterangan
● : Tercapai (achieved)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
▶ : Akan tercapai/membaik (positive change)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼ : Perlu perhatian khusus (negative change)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

4.3.2 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan NonPemerintah

- a. Cara Pengisian Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah (FORM 2)

Tabel 2. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah (FORM 2b)

Nama Tujuan SDGs													
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target tahun (n) (3)	Realisasi Target tahun (n) (4)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)		Sumber Pendana -an (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Instansi Pelaksa- na (9)
						Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (10):													
Kode dan Nama Program (11):													
Kode Kegiatan (12)	Nama Kegiatan (13)	Kode Sub Kegiatan (14)	Nama Sub Kegiatan (15)										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										



- b. Cara Pengisian Formulir Self Assessments Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program NonPemerintah (FORM 3)

Tabel 4. Formulir Self Assessments rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan academia

Nama Tujuan SDGs											
Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target tahun (n) (3)	Realisasi Target tahun (n) (4)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)		Sumber Pendana- an (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (10):											
Nama Program 1 (11):											
Nama Kegiatan 1 (12)	1.1. Output Kegiatan (13)										
	1.2. Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2	2.1. Output Kegiatan										
	2.2. Output Kegiatan										

4.4 Laporan Pencapaian TPB

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi Form: Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan
- 2) Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs (Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1);
- 3) Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Tantangan dan pembelajaran
 - c. Kebijakan dan strategi
 - d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
- 4) Penutup



BAB V

MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH

RAD TPB ini mengakomodasi asa global yang terkesan ambisius, bersifat global dan tak terpisahkan. Asa ini mewujudkan dalam 17 Tujuan global. Karena itu, tantangan yang langsung muncul di hadapan semua pemangku kepentingan adalah bagaimana Tujuan-Tujuan global ini berelevansi dengan kondisi nasional dan lokal. Pergeseran atau transisi dari global ke lokal sungguh krusial karena setiap individu dan komunitas yang menjadi target sasaran dari Tujuan-Tujuan global ini terikat oleh eksistensi mereka secara lokal.

RAD TPB ini juga melalui proses transisi ini. Secara global, TPB menawarkan 17 Tujuan, 169 Target, dan 400 Indikator. Transisi dari konteks global ini ke RAD TPB ini memperlihatkan bahwa tidak semua target dan indikator dapat diurusutamakan, diselaraskan, bahkan relevan dengan kondisi dan konteks kedaerahan, serta format dokumen perencanaan jangka menengah yang telah disusun. Proses transisi ini melalui beberapa analisis penyaring yang dimulai dengan kategori “kewenangan daerah/provinsi”. Kategori ini mewakili sistem otonomi, melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia. Kategori berikutnya adalah “indikator masih sulit diukur oleh daerah”. Kategori ini menggambarkan pentingnya alat ukur pencapaian setiap indikator sehingga ketika alat ukur tersebut tidak tersedia di level daerah, indikator tersebut tidak bisa diukur pencapaiannya. Kategori selanjutnya adalah “tidak atau kurang tersedianya data pendukung dalam penetapan target indikator di daerah”. Kategori ini menggambarkan kesulitan yang selaras dengan kategori sebelumnya. Dengan kurangnya data pendukung, target capaian menjadi sukar untuk diukur. Saringan terakhir dalam proses transisi ini mengacu pada “indikator tidak selaras/sejalan dengan RPJMD dan Renstra Daerah.” Kategori ini menjadi saringan terpenting dan terakhir. Alasannya, kategori ini menggambarkan program-program yang telah ditata dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah mempunyai landasan dan kekuatan yuridis berdasarkan keputusan kepala daerah.

Proses transisi ini menghasilkan 17 Tujuan, 59 Target, dan 89 Indikator yang selaras dan relevan dengan kondisi dan konteks daerah dan, terutama kapasitas perencanaan dan penganggaran jangka menengah daerah, yaitu RPJMD dan Renstra OPD 2021-2026. Persandingan penetapan target dan indikator TPB Global-Nasional-Lokal dapat digambarkan dalam tabel berikut.



**Tabel 4.1. Persandingan penetapan target dan indikator TPB
Global-Nasional dan Sulawesi Utara**

Jumlah Target TPB/SDGs Edisi-II Yang Telah Diurusutamakan						
Tujuan/ Goals	Global		Nasional		Sulawesi Utara	
	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Jumlah Target	Jumlah Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	7	15	6	14	5	5
2. Tanpa Kelaparan	8	17	8	16	4	7
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	39	9	31	8	19
4. Pendidikan Berkualitas	10	18	9	14	5	6
5. Kesenjangan Gender	9	14	8	12	2	3
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	8	16	6	10	3	3
7. Energi Bersih dan Terjangkau	5	9	5	7	1	1
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	12	25	11	19	4	6
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	8	23	7	21	1	1
10. Berkurangnya Kesenjangan	10	29	6	17	1	3
11. Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	10	28	10	17	7	8
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab	11	23	10	17	1	2
13. Penanganan Perubahan Iklim	5	12	4	9	2	2
14. Ekosistem Laut	10	15	7	10	4	5
15. Ekosistem Daratan	12	21	12	14	4	4
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	12	54	11	36	6	13
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	19	42	13	25	1	1
Total	169	400	124	289	59	89



Tabel 5.1 Matriks Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
Tujuan 1: Tanpa kompleknan													
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.													
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim		BPS	Persen	(a). 1,87; (b). 7,28	(a). 1,02; (b). 7,5–6,9	(a). 0,5; (b). 5,93	(a). 0; (b). 5,65	(a). 0; (b). 5,37	(a). 0; (b). 5,09		APBD	TKPKD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang memperoleh pengembangan infrastruktur permukiman	Renstra OPD 2022-2026	Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	38,827,683,505	APBD Prov	
1.03.07.1.0 1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,827,683,505	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.89 .	0.894 .	0.899 .	0.903 .	0.908 .	0.912 .	544,227,637,560	APBD Prov	
1.03.10.1.0 1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rasio Kemantapan Jalan provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.89 .	0.894 .	0.899 .	0.903 .	0.908 .	0.912 .	544,227,637,563	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.04.02.1.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program pendataan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,882,982,352	APBD Prov	
1.04.03.1.0 2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,383,035,671	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI PSU	Renstra OPD 2022-2026	%	47 %	54 %	61 %	68 %	75 %	82 %	137,518,047,964	APBD Prov	
1.04.05.1.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	137,518,047,964	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,009,921,497	APBD Prov	
1.05.03.1.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sesuai standar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,208,925,533	APBD Prov	BADAN PENANGGULGAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,762,646,333	APBD Prov	BADAN PENANGGULGAN GAN BENCANA DAERAH
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	Renstra OPD 2022-2026	%	5 %	10 %	15.20 %	20.40 %	25.80 %	31.30 %	1,900,128,744	APBD Prov	
1.06.02.1.0 1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	izin	0 izin	20 izin	20 izin	20 izin	20 izin	20 izin	335,718,738	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.0 2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif	Renstra OPD 2022-2026	PSKS	97 PSKS	68 PSKS	76 PSKS	76 PSKS	81 PSKS	81 PSKS	1,564,410,006	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhannya di dalam Panti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,738,509,786	APBD Prov	
1.06.04.1.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,385,679,710	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.0 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,005,983,024	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.0 3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	(1) Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; (2) Penyediaan Panti Lanjut Usia Eksklusif.	Renstra OPD 2022-2026	%	100 dan 1 % dan Panti	100 dan 1 % dan Panti	100 dan 1 % dan Panti	100 dan 1 % dan Panti	100 dan 1 % dan Panti	100 dan 1 % dan Panti	10,774,097,201	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.0 4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,836,270	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.0 5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase PMKS yang tertangani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	530,913,581	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,954,434,132	APBD Prov	
1.06.05.1.0 1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Renstra OPD 2022-2026	Anak	0 Anak	2 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	106,182,716	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	67 %	73 %	80 %	86 %	100 %	13,848,251,416	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	
1.06.06.1.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	DINAS SOSIAL

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	55,5 %	60 %	61 %	62 %	63 %	64 %	492,001,146	APBD Prov	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	lowongan	900 lowongan	1000 lowongan	1025 lowongan	1050 lowongan	1080 lowongan	1090 lowongan	492,001,146	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	2,287,018,825	APBD Prov	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Penyerapan Lulusan	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	80 %	1,795,313,882	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	303,886,778	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Renstra OPD 2022-2026	Perusahaan	150 Perusahaan	0 Perusahaan	225 Perusahaan	250 Perusahaan	275 Perusahaan	300 Perusahaan	187,818,165	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.01	Pelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN Keadilan Gender (PER 10.000 KK)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	15 Rasio	12.5 Rasio	15 Rasio	17.5 Rasio	20 Rasio	25 Rasio	3,294,470,116	APBD Prov	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	80 %	85 %	89 %	93 %	95 %	1,411,915,764	APBD Prov	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Gender dan Anak	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,411,915,764	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,376,724,869	APBD Prov	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Renstra OPD 2022-2026	%	66.6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	24,049,631,845	APBD Prov	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	6 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	24,049,631,845	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	Renstra OPD 2022-2026	Orang	525; 525 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	555; 555 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	615; 615 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	705; 705 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	750; 750 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	14,268,207,627	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.17.05.1.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten	Renstra OPD 2022-2026	Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	14,268,207,627	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	524,668,110	APBD Prov	
2.17.07.1.0 1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	524,668,110	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	Renstra OPD 2022-2026	UMKM	200 UMKM	210 UMKM	220 UMKM	231 UMKM	243 UMKM	255 UMKM	2,727,377,849	APBD Prov	
2.17.08.1.0 1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	UMKM Naik Kelas	Renstra OPD 2022-2026	UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	2,727,377,849	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESIRIS YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDINYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDINYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	Renstra OPD 2022-2026	%	99,99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,576,960,267	APBD Prov	
3.29.06.1.0 1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI (TATACARA PENERBITAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,882,601	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	TERDAPATNYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	212,739,600	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.29.06.1.03	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	TERDATANYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,817,828,053	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	TERDATANYA SURAT PERSETUJUAN GUBERNUR TERKAIT HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG IZIN YANG DITETAPKAN OLEH DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	79,635,300	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	JUMLAH PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	79,635,300	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	TERDATANYA PEMBANGUNAN LISTRIK PEDESAAN DAN PENYAMBUNGAN LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,207,729,312	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	131,603,808,492	APBD Prov	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1. Tersedianya rekomendasi pembinaan mental spiritual; 2. Persentase Penyediaan Pembinaan Mental Spiritual	Renstra OPD 2022-2026	%	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	120,537,437,911	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1) Jumlah rekomendasi hasil pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,494,404,360	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,571,966,221	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	131,603,808,492	APBD Prov	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1. Tersedianya rekomendasi pembinaan mental spiritual; 2. Persentase Penyediaan Pembinaan Mental Spiritual	Renstra OPD 2022-2026	%	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	120,537,437,911	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1) Jumlah rekomendasi hasil pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,494,404,360	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,571,966,221	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	%	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,396,497,860	APBD Prov	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	930,607,040	APBD Prov	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	4,246,757,870	APBD Prov	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	3,219,132,948	APBD Prov	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.													
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan / (Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan)		Dinas Kesehatan Daerah	Persen	91.11	94	96	98	98	98		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.		BPS (air minum dan sanitasi)	Persen	Akses Air Minum Layak = 91,65%; dan Akses Sanitasi Layak = 81,65%	Akses Air Minum Layak = 92%; dan Akses Sanitasi Layak = 85%	Akses Air Minum Layak = 94%; dan dan Akses Sanitasi Layak = 87%	Akses Air Minum Layak = 96%; dan Akses Sanitasi Layak = 89%	Akses Air Minum Layak = 98%; dan Akses Sanitasi Layak = 91%	Akses Air Minum Layak = 100%; dan Akses Sanitasi Layak = 93%		APBD	Dinas PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.02 .	0.06 .	0.06 .	0.07 .	0.08 .	0.08 .	16,747,147,037	APBD Prov	
1.03.05.1.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Tersedianya SPALD Regional	Renstra OPD 2022-2026	unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	16,747,146,737	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	15,531,073,403	APBD Prov	
1.03.06.1.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,531,073,401	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang memperoleh pengembangan infrastruktur permukiman	Renstra OPD 2022-2026	Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	38,827,683,505	APBD Prov	
1.03.07.1.0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,827,683,505	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,954,434,132	APBD Prov	
1.06.05.1.0 1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Renstra OPD 2022-2026	Anak	0 Anak	2 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	106,182,716	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	67 %	73 %	80 %	86 %	100 %	13,848,251,416	APBD Prov	DINAS SOSIAL
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.													
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		BNPB	Jumlah	1485.69	NA	NA	NA	NA	NA		APBD	BPBD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Pemberitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,606,102,210	APBD Prov	
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	15 Kegiatan	3 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	4,482,692,000	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03.1.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	123,410,210	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/kota	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,616,436,185	APBD Prov	
1.05.04.1.0 1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	0 Kab/Kota	5 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,466,436,185	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.05.04.1.0 2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	150,000,000	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/kota Tangguh Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,009,921,497	APBD Prov	
1.05.03.1.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sesuai standar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,208,925,533	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,762,646,333	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,080,406,818	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	957,942,813	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	
1.06.06.1.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	DINAS SOSIAL
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.0 1	Bencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	4,070,130,643	APBD Prov	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	4,080,130,643	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.													
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.		Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah	Persen	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%	Pendidikan=20%; Kesehatan=10%		APBD	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan;
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7,059,578,819	APBD Prov	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,500,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,559,578,819	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pelaksanaan Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pelaksanaan pengembangan Bahasa dan Sastra	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,412,771,759	APBD Prov	
1.02.04.1.0 1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Presentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang mendapatkan pengakuan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,412,771,759	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	JUmlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Tujuan 2. Tanpa kelaparan													
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.													
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		BPS	Persen	6.91	6	5.5	5	5	5		APBD	Dinas Pangan; Dinas Pertanian dan Peternakan;
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	93 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	423,574,730	APBD Prov	
2.09.02.1.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya laporan infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	423,574,730	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurinya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa keputuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSEDINYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.06.1.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBU SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKEMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.0 1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	429,674,416	APBD Prov	
3.27.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429,674,416	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDINYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,036,766,060	APBD Prov	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASI JUMLAH PETANI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,691,522,313	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	TERBINANYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PEKEBUN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	345,243,747	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ (Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan)		Dinas Pangan Daerah	Persen	14.03	12.03	10.03	8.03	6.03	4.03		APBD	Dinas Pangan; Dinas Pertanian dan Peternakan;
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	93 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	423,574,730	APBD Prov	
2.09.02.1.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	423,574,730	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurinya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TEHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Adminstrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSEDIA NYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBU SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKEMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.0 1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOMANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	429,674,416	APBD Prov	
3.27.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429,674,416	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	4,070,130,643	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	4,080,130,643	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,036,766,060	APBD Prov	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASI JUMLAH PETANI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,691,522,313	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	TERBINANYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PEKEBUN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	345,243,747	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		BPS	Persen	21.6	16.2	15	14	13	12		APBD	TPPS
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio <u>Daya Tampung RS Rujukan"</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan <u>Tingkat Daerah Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk <u>UKM dan UKP Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif <u>tingkat daerah Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.02 .	0.06 .	0.06 .	0.07 .	0.08 .	0.08 .	16,747,147,037	APBD Prov	
1.03.05.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Tersedianya SPALD Regional	Renstra OPD 2022-2026	unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	16,747,146,737	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau <u>Relokasi Program Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi <u>Program Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau <u>Relokasi Program Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau <u>Relokasi Program Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,954,434,132	APBD Prov	
1.06.05.1.0 1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Renstra OPD 2022-2026	Anak	0 Anak	2 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	106,182,716	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan <u>pemutakhiran data</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	67 %	73 %	80 %	86 %	100 %	13,848,251,416	APBD Prov	DINAS SOSIAL
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI)	Renstra OPD 2022-2026	%	68 %	70 %	72.5 %	75 %	77.5 %	80 %	2,465,932,390	APBD Prov	
2.12.03.1.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	359,082,728	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03.1.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,331,499,406	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03.1.0 3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	775,350,256	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	30 %	30 %	29.8 %	29.8 %	29.6 %	722,312,847	APBD Prov	
2.14.04.1.0 1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Renstra OPD 2022-2026	%	3,55 %	3,55 %	3,55 %	3,55 %	3,55 %	3,55 %	402,659,005	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.0 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	319,653,842	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Renstra OPD 2022-2026	%	22.7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,223,874,328	APBD Prov	
2.13.04.1.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	5 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	3,223,434,328	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	28,034,972,760	APBD Prov	
2.16.03.1.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	331,790,003	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.1.0 2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	27,703,182,757	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBUSI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.02.1.0 1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	131,603,808,492	APBD Prov	
4.01.04.1.0 1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1. Tersedianya rekomendasi pembinaan mental spiritual; 2. Persentase Penyediaan Pembinaan Mental Spiritual	Renstra OPD 2022-2026	%	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	120,537,437,911	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.0 2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1) Jumlah rekomendasi hasil pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,494,404,360	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.0 3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,571,966,221	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		BPS	Persen	7.1	7.1	7	7	6.8	6.8		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)/(Skor Pola Pangan Harapan)		Dinas Pangan Daerah	Nilai	83.1	94.5	94.7	95	95	95		APBD	Dinas Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	93 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	423,574,730	APBD Prov	
2.09.02.1.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	423,574,730	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurinya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBU SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKEMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	429,674,416	APBD Prov	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429,674,416	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSentase Peningkatan Produktivitas Pertanian per hektar per tahun	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	4,070,130,643	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Provinsi	PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	4,080,130,643	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,036,766,060	APBD Prov	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASI JUMLAH PETANI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,691,522,313	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	TERBINANYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PEKEBUN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	345,243,747	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.													
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor/(Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya)		BPS	Nilai	NTPP=104,83; NTPH=102,33; NTPNAK=103,28; NTP Perkebunan= 114,48; NTNP= 104;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 93- 100; NTNP= 104;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 94- 100; NTNP= 105;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 95- 100; NTNP= 106;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 95- 100; NTNP= 107;	NTPP=100-103; NTPH=100-103; NTPNAK=100-103; NTP Perkebunan 95- 100; NTNP= 108;		APBD	Dinas Pertanian dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta Perkebunan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	93 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	423,574,730	APBD Prov	
2.09.02.1.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	423,574,730	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersaluranya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa keputuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUIDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUIDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUIDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUIDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBU SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKEMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	429,674,416	APBD Prov	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429,674,416	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	4,070,130,643	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	4,080,130,643	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,036,766,060	APBD Prov	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASI JUMLAH PETANI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,691,522,313	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	TERBINANYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PEKEBUN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	345,243,747	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
Target 2.c Mengadopsi langkahlangkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.													
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan/(Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan)		Dinas Pangan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Pangan;
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurinya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera													
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)		Dinas Kesehatan Daerah	Angka	173	150	125	100	75	50		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.		Dinas Kesehatan Daerah	Persen	(a) = 95%; (b) = 89,91%	(a) = 97%; (b) = 91%	(a) = 98%; (b) = 92%	(a) = 99%; (b) = 93%	(a) = 100%; (b) = 94%	(a) = 100%; (b) = 95%		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1); 4); 2) 52,2 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 55 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 57,5 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 60 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 62,5 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.													
3.2.1*	a. Angka Kematian Balita (AKBa); b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan Daerah	Jumlah	a. 6; b. 5	a. 6; b. 5	a. 5; b. 4	a. 5; b. 4	a. 4; b. 3	a. 4; b. 3		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1); 4); 2) 52,2 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 55 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 57,5 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 60 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 62,5 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan Daerah	Jumlah	4	4	3	3	2	2		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1); 4); 2) 52,2 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 55 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 57,5 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 60 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 62,5 1) RS; 2) %	1); 5); 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.													

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi/ (Cakupan Orang dengan HIV Aids (ODHA) dalam pengobatan ARV)		Dinas Kesehatan Daerah	Persen	28	30	30	35	40	45		APBD	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk/(Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC)		Dinas Kesehatan Daerah	Persen	82	84	84	86	88	90		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang		Dinas Kesehatan Daerah	Persen	0.35	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio <u>Daya Tampung RS Rujukan</u> "	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan <u>Tingkat Daerah Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.		Dinas Kesehatan Daerah	Jumlah Kab/Kota	13	13	13	14	15	15		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio <u>Daya Tampung RS Rujukan</u> "	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan <u>Tingkat Daerah Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.													
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun/(Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTRI)		Dinas Kesehatan	Persen	3	3	6	9	12	15		APBD	Dinas Kesehatan

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGERA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		Dinas Kesehatan	%	33.12	31	29	27	25	23		APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		Prevalensi Status Gizi Berdasarkan Kategori IMT pada Penduduk dewasa (umur >18 tahun), Riskedas 2018	%	21.8	21	20.5	20	19.5	19			Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,651,087,036	APBD Prov	
1.02.05.1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan/Peraturan terkait Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas sektor	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8,368,744,972	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23,972,342,063	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan UKBM aktif	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5,310,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.													
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern/(Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)		BPS	Persen	62.5	62.5	65	67	69	71		APBD	Dukcapil KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Renstra OPD 2022-2026	%	62.5 %	62.5 %	65 %	67 %	69 %	71 %	359,063,371	APBD Prov	
2.14.03.1.0 1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Renstra OPD 2022-2026	%	8.76 %	8.76 %	8.50 %	8.45 %	8.40 %	8.37 %	330,261,817	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.1.0 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan ber-KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	20.10 %	20.10 %	20.10 %	20.10 %	20.10 %	28,801,554	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama/(Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19))		BPS	Persen	30	30	30	29.8	29.8	29.6		APBD	Dukcapil KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	30 %	30 %	29.8 %	29.8 %	29.6 %	722,312,847	APBD Prov	
2.14.04.1.0 1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Renstra OPD 2022-2026	%	3,55 %	3,55 %	3,55 %	3,55 %	3,55 %	3,55 %	402,659,005	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.0 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	319,653,842	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		BPS	Nilai	2.25	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21		APBD	Dukcapil KB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Renstra OPD 2022-2026	NILAI	2.25 NILAI	2.25 NILAI	2.24 NILAI	2.23 NILAI	2.22 NILAI	2.21 NILAI	482,958,192	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.14.02.1.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	275,528,829	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.1.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	207,429,363	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.													
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.		BPS	Persen	8.76	8.76	8.50	8.45	8.40	8.37		APBD	Dukcapil KB
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/(Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan)		Dinas Kesehatan Daerah	%	91.11	94	96	98	98	98		APBD dan APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.													
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional/(Persentase Kab/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap)		Dinas Kesehatan Daerah	Persen	33	67	80	87	93	100		APBD	Dinkes
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan/(Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan obat esensial)		Dinas Kesehatan Daerah	%	79.3	85	90	85	100	100		APBD	Dinkes
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,412,771,759	APBD Prov	
1.02.04.1.0 1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Presentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang mendapatkan pengakuan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,412,771,759	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.													
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Dinas Kesehatan Daerah	Angka	6.24	6.8	7.4	8	8.6	9.2		APBD	Dinkes
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	50/100.000 Penduduk	#VALUE!	APBD Prov	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	86,618,412,413	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	60 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	12,215,691,057	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas													
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.													
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		BPS	Persen	SD/ Sederajat= 96,1; SMP/ Sederajat= 91,05; SMA/ Sederajat= 68,56;	SD/ Sederajat= 96,5; SMP/ Sederajat= 91,5; SMA/ Sederajat= 70;	SD/ Sederajat= 97; SMP/ Sederajat= 92; SMA/ Sederajat= 71;	SD/ Sederajat= 97,5; SMP/ Sederajat= 92,5; SMA/ Sederajat= 72;	SD/ Sederajat= 98; SMP/ Sederajat= 93; SMA/ Sederajat= 73;	SD/ Sederajat= 98,5; SMP/ Sederajat= 93,5; SMA/ Sederajat= 74;		APBD	Dinas Pendidikan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat/ ((a).Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-6 Tahun; (b).Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-12 Tahun; (c). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 13-15 Tahun; (d). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 16-18 Tahun		BPS	Persen	(a)= 28,61; (b)= 99,37; (c)= 95,41; (d)= 73,86;	(a)= 29,20; (b)= 99,40; (c)= 95,60; (d)= 74,00;	(a)= 29,60; (b)= 99,43; (c)= 96,80; (d)= 74,20;	(a)= 30,00; (b)= 99,46; (c)= 97,00; (d)= 74,40;	(a)= 30,20; (b)= 99,49; (c)= 97,20; (d)= 74,60;	(a)= 30,60; (b)= 99,52; (c)= 97,40; (d)= 74,80;		APBD	Dinas Pendidikan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.01.03.1.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.0 1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.													
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.		BPS	Persen	96.06	96.30	96.60	96.90	97.20	97.50		APBD	Dinas Pendidikan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.1.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.0 1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7,059,578,819	APBD Prov	
1.01.05.1.0 1	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,500,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.1.0 2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,559,578,819	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.													
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/Sederajat, dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas/		BPS	Persen	APM SD/Sederajat= 95,39; APM SMP/Sederajat= 74,94; APM SMA/Sederajat= 63,33; APK SD/Sederajat= 106,56; APK SMP/Sederajat= 90,45; APK SMA/Sederajat= 86,17	APM SD/Sederajat= 95,60; APM SMP/Sederajat= 75,30; APM SMA/Sederajat= 63,80; APK SD/Sederajat= 106,90; APK SMP/Sederajat= 90,65; APK SMA/Sederajat= 86,30	APM SD/Sederajat= 95,80; APM SMP/Sederajat= 75,60; APM SMA/Sederajat= 64,10; APK SD/Sederajat= 107,20; APK SMP/Sederajat= 90,85; APK SMA/Sederajat= 86,60	APM SD/Sederajat= 96,00; APM SMP/Sederajat= 75,90; APM SMA/Sederajat= 64,50; APK SD/Sederajat= 107,50; APK SMP/Sederajat= 91,05; APK SMA/Sederajat= 86,90	APM SD/Sederajat= 96,20; APM SMP/Sederajat= 76,10; APM SMA/Sederajat= 65,20; APK SD/Sederajat= 107,80; APK SMP/Sederajat= 91,25; APK SMA/Sederajat= 87,10	APM SD/Sederajat= 96,40; APM SMP/Sederajat= 76,30; APM SMA/Sederajat= 65,70; APK SD/Sederajat= 108,10; APK SMP/Sederajat= 91,45; APK SMA/Sederajat= 87,40		APBD	Dinas Pendidikan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.01.03.1.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.0 1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7,059,578,819	APBD Prov	
1.01.05.1.0 1	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,500,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.1.0 2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,559,578,819	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pelaksanaan Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.06.1.0 1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pelaksanaan pengembangan Bahasa dan Sastra	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.													
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		BPS	Persen	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8		APBD	Dinas Pendidikan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.1.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.0 1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pelaksanaan Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.06.1.0 1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pelaksanaan pengembangan Bahasa dan Sastra	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.													
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.		BPS	Persen	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=34,5%; SD=92,9%; SMP=96%; SMA=98,5%; SMK=95,5%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=35%; SD=93,2%; SMP=96,2%; SMA=98,6%; SMK=95,7%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=35,5%; SD=93,5%; SMP=96,5%; SMA=98,7%; SMK=95,9%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=36%; SD=93,8%; SMP=96,8%; SMA=98,8%; SMK=96,1%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=36,5%; SD=94,1%; SMP=97,1%; SMA=98,9%; SMK=96,3%	Berdasarkan Kualifikasi: Paud=37%; SD=94,4%; SMP=97,5%; SMA=99%; SMK=96,5%		APBD	Dinas Pendidikan Daerah
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.1.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:14 Rasio	01:13 Rasio	01:13 Rasio	01:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	
1.01.04.1.0 1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid pendidikan Menengah Atas	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:14 Rasio	1:13 Rasio	1:13 Rasio	1:12 Rasio	4,706,395,879	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7,059,578,819	APBD Prov	
1.01.05.1.0 1	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,500,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.1.0 2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PKBM yang memiliki izin	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,559,578,819	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
Tujuan 5. Kesetaraan gender													
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.													
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir/(a). Jumlah Kasus & Korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) Dewasa; (b). Jumlah Kasus & Korban Kekerasan terhadap Anak (KtA)		Dinas P3A	Jumlah	(a). 201 dan 197; (b). 465 dan 440;	(a). 180 dan 175; (b). 425 dan 400;	(a). 160 dan 155; (b). 380 dan 360;	(a). 140 dan 135; (b). 340 dan 320;	(a). 120 dan 115; (b). 300 dan 280;	(a). 100 dan 90; (b). 250 dan 230;			DP3A
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,241,569,642	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	2,527,976,606	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	
2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Renstra OPD 2022-2026	Media Masa	2 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	676,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir./Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi		Dinas P3A	Angka	0.71	0.71	0.65	0.60	0.55	0.5			DP3A
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,241,569,642	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	2,527,976,606	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	
2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Renstra OPD 2022-2026	Media Masa	2 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	676,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.													
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Dinas P3A	Indeks	79.07	79.09	80.1	80.12	80.14	80.16			BPS; DP3A; Setwan; BKD
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	15 Rasio	12.5 Rasio	15 Rasio	17.5 Rasio	20 Rasio	25 Rasio	3,294,470,116	APBD Prov	
2.08.04.1.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,135,482,026	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.1.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,408,988,090	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.1.0 3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak	Renstra OPD 2022-2026	Layanan	0 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	750,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	80 %	85 %	89 %	93 %	95 %	1,411,915,764	APBD Prov	
2.08.05.1.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Gender dan Anak	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,411,915,764	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,376,724,869	APBD Prov	
2.08.06.1.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang dibentuk	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	976,724,869	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.1.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10,599,708,649	APBD Prov	
4.01.05.1.0 1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan yang di fasilitasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6,780,650,094	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.05.1.0 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase tingkat penyelesaian Hukum pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,818,994,186	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	13,258,145,033	APBD Prov	
5.01.02.1.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,829,937,169	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.02.1.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,450,479,630	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.02.1.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dan tersedianya pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,977,728,232	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	29,221,513,163	APBD Prov	
5.01.03.1.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6,101,981,394	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.03.1.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,518,239,854	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.03.1.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,601,291,913	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak													
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.													
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman/(Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layana Sumber Air Minum Layak)		BPS	Persen	91.65	92	94	96	98	100		APBD	Dinas PUPRD
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang memperoleh pengembangan infrastruktur permukiman	Renstra OPD 2022-2026	Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	38,827,683,505	APBD Prov	
1.03.07.1.0 1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,827,683,505	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.													
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun/(Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak)		BPS	Persen	81.65	85	87	89	91	93		APBD	Dinas PUPRD
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.02 .	0.06 .	0.06 .	0.07 .	0.08 .	0.08 .	16,747,147,037	APBD Prov	
1.03.05.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Tersedianya SPALD Regional	Renstra OPD 2022-2026	unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	16,747,146,737	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	15,531,073,403	APBD Prov	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,531,073,401	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang memperoleh pengembangan infrastruktur permukiman	Renstra OPD 2022-2026	Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	38,827,683,505	APBD Prov	
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,827,683,505	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.													
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.		Dinas Lingkungan Hidup Daerah (Data hasil pemantauan)	Sungai/ Danau	5	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	1,520,499,881	APBD Prov	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,520,499,881	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau													
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern													
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.		BPS	Persen	99.99	100	100	100	100	100		APBD	Dinas ESDM
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,429,219,007	APBD Prov	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT ZONASI KAWASAN KONSERVASI AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,478,153,751	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.29.02.1.0 3	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	951,065,255	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,457,674,705	APBD Prov	
3.29.03.1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT DENGAN PERIZINAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	7 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	288,856,400	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT IUJP MINERAL LOGAM ATAU BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	15 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	17 Kegiatan	902,678,690	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 3	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	378,091,200	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 4	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT IUJP	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	15 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	507,791,270	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 5	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT IUJP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KOMODITAS TAMBANGNYA BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG SAMA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	210,547,040	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 6	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT IUJP DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	50,000,000	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 7	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,127,635	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 8	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DILAKUKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26,545,635	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.0 9	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT IUP OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN YANG KEGIATAN USAHANYA DILAKUKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26,545,635	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.1 0	Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PERSETUJUAN PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK IZIN USAHA YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	53,091,200	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03.1.1 1	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIR PENERBITAN IZIN SEMENTARA UNTUK PENJUALAN MINERAL ATAU BATUBARA YANG TERGALI BAGI PEMEGANG IUP EKSPLORASI YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR PADA SAAT KEGIATAN EKSPLORASI ATAU STUDI KELAYAKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Renstra OPD 2022-2026	%	35 %	36 %	36 %	37 %	37,5 %	38 %	4,918,173,244	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.29.05.1.0 1	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	TERLAKSANANYA IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	179,336,800	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05.1.0 2	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERDATANYA SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) JASA USAHA PENUNJIANG ENERGI	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	153,959,400	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05.1.0 3	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	TERLAKSANANYA IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	209,606,320	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05.1.0 4	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	TERLAKSANANYA PENINGKATAN KONSERVASI ENERGI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,375,270,724	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	Renstra OPD 2022-2026	%	99,99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,576,960,267	APBD Prov	
3.29.06.1.0 1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI (TATACARA PENERBITAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,882,601	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	TERDATANYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	212,739,600	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.0 3	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	TERDATANYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,817,828,053	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.0 4	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	TERDATANYA SURAT PERSETUJUAN GUBERNUR TERKAIT HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG IZIN YANG DITAPKAN OLEH DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	79,635,300	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.0 5	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	JUMLAH PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	79,635,300	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06.1.0 6	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Desa	TERDATANYA PEMBANGUNAN LISTRIK PEDESAAN DAN PENYAMBUNGAN LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,207,729,312	APBD Prov	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi													
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang													
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita		BPS	Persen	4,16	4,5-5,5	5-5,7	5,7-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0		APBD	Pemerintah Daerah
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	93 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	423,574,730	APBD Prov	
2.09.02.1.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya laporan Infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	423,574,730	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurinya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN	Renstra OPD 2022-2026	KSP/USP	30 KSP/USP	60 KSP/USP	90 KSP/USP	120 KSP/USP	150 KSP/USP	180 KSP/USP	853,267,761	APBD Prov	
2.17.02.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Izin Usaha Pembukaan Kantor Koperasi	Renstra OPD 2022-2026	Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	303,486,489	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Izin Usaha Pembukaan Kantor Koperasi	Renstra OPD 2022-2026	Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	549,781,272	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	Renstra OPD 2022-2026	Unit	3766 Unit	3803 Unit	3841 Unit	3879 Unit	3918 Unit	3957 Unit	1,254,722,474	APBD Prov	
2.17.03.1.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,254,722,474	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	491,767,084	APBD Prov	
2.17.04.1.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi Sehat dan Aktif	Renstra OPD 2022-2026	Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	491,767,084	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	Renstra OPD 2022-2026	Orang	525; 525 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	555; 555 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	615; 615 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	705; 705 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	750; 750 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	14,268,207,627	APBD Prov	
2.17.05.1.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten	Renstra OPD 2022-2026	Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	14,268,207,627	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM	Renstra OPD 2022-2026	KUMKM	60 KUMKM	120 KUMKM	180 KUMKM	240 KUMKM	300 KUMKM	360 KUMKM	1,785,255,528	APBD Prov	
2.17.06.1.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan Hukum Atas Produk	Renstra OPD 2022-2026	KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	1,785,255,528	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	524,668,110	APBD Prov	
2.17.07.1.0 1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	524,668,110	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	Renstra OPD 2022-2026	UMKM	200 UMKM	210 UMKM	220 UMKM	231 UMKM	243 UMKM	255 UMKM	2,727,377,849	APBD Prov	
2.17.08.1.0 1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	UMKM Naik Kelas	Renstra OPD 2022-2026	UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	2,727,377,849	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	10 %	10 %	12 %	12 %	15 %	2,356,237,972	APBD Prov	
2.18.02.1.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Perda/SOP Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,359,820,680	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.1.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Perda	0 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	996,417,292	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU	Renstra OPD 2022-2026	MOU/KERJA JA	2 MOU/KERJA SAMA	2 MOU/KERJA SAMA	3 MOU/KERJA SAMA	4 MOU/KERJA SAMA	5 MOU/KERJA SAMA	6 MOU/KERJA SAMA	355,308,601	APBD Prov	
2.18.03.1.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri	Renstra OPD 2022-2026	%	25 Persentase	25 Persentase	30 Persentase	50 Persentase	60 Persentase	65 Persentase	355,308,601	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU	Renstra OPD 2022-2026	%	85 %	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %	2,873,278,555	APBD Prov	
2.18.04.1.0 1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Yang Ruang Lingkupnya Daerah Kab/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	79 Nilai	79 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	85 Nilai	1,596,279,047	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.18.04.1.0 2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat [Indeks Kepuasan Masyarakat] Kewenangan Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	79 Nilai	79 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	85 Nilai	1,276,999,508	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN UKPM	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	2,151,447,242	APBD Prov	
2.18.05.1.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,151,447,242	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	852,430,503	APBD Prov	
2.18.06.1.0 1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	852,430,503	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.04.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSEDIA NYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBU SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKEMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PERKEBANGSAAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	166 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23,782,462,259	APBD Prov	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,409,490,538	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSP	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,061,827,162	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19,311,144,558	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA DAN WISATAWAN NUSANTARA	Renstra OPD 2022-2026	Wisnu dan wisman	150.000 dan 15.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	9,341,888,778	APBD Prov	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,341,888,778	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	1,3 %	2 %	3 %	3,3 %	3,5 %	4 %	4,355,024,071	APBD Prov	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,355,024,071	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	16,425,000,000	19,710,000,000	20,104,200,000	2,050,628,400	20,916,409,680	21,334,737,874		APBD Prov	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,367,984,470	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	2 %	18 %	16 %	14 %	12 %	1,542,501,529	APBD Prov	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,542,501,529	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	429,674,416	APBD Prov	
3.27.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429,674,416	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	4,070,130,643	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Provinsi	PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	4,080,130,643	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,036,766,060	APBD Prov	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASI JUMLAH PETANI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,691,522,313	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	TERBINANYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PEKEBUN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	345,243,747	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	0 %	80 %	80 %	80 %	80 %	133,142,017	APBD Prov	
3.30.02.1.0 3	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	PERSENTASE PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	133,142,017	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	141,191,577	APBD Prov	
3.30.03.1.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	TERTOPANG KOMODITAS UTAMA BAHAN POKOK SULAWESI UTARA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	159,274,074	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	LAJU INFLASI TERKENDALI	Renstra OPD 2022-2026	%	3±1 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	5,035,832,889	APBD Prov	
3.30.04.1.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	TERJAGANYA STOK BAPOKTING	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	173,406,900	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.1.0 2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	TERKENDALINYA DEVIASI HARGA BAPOKTING	Renstra OPD 2022-2026	%	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	4,965,832,891	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.1.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	PENGUNAAN PUPUK SUBSIDI TEPAT SASARAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	231,209,200	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS	Renstra OPD 2022-2026	%	1,20 %	5-6 %	6 %	6,25 %	6,50 %	6,75 %	2,273,166,381	APBD Prov	
3.30.05.1.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	DIKENALNYA KOMODITI EKSPOR UNGGULAN DAN POTENSIAL SULAWESI UTARA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,273,166,381	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Renstra OPD 2022-2026	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	887,549,601	APBD Prov	
3.30.06.1.0 2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	KOMODITI MEMENUHI STANDAR	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	493,102,261	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.1.0 3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	BARANG/JASA YANG BEREDAR AMAN BAGI KONSUMEN	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	394,447,340	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	0 %	75 %	75 %	75 %	75 %	179,921,645	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	JUMLAH SOSIALISASI YANG DILAKUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	179,921,645	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIIP	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,335,455,389	APBD Prov	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	PENGEMBANGAN INDUSTRI SEMAKIN TERARAH	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	13,335,455,389	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IZIN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	188,255,435	APBD Prov	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	PELAKU INDUSTRI TERTIB BERUSAHA	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	188,255,435	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	470,638,587	APBD Prov	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	TERDATANYA INDUSTRI DALAM SIINAS	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	470,638,587	APBD Prov	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.1.1.(a)	PDB per kapita / (PDRB Per Kapita)		BPS	Rp. Juta	54	56	60	65	70	76		APBD	Pemerintah Daerah
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	93 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	100 % (275 Ton)	423,574,730	APBD Prov	
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	423,574,730	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Renstra OPD 2022-2026	Skor	94,1	94,5	94,5	94,7	95	95	6,871,323,387	APBD Prov	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurinya pangan pokok dan pangan lainnya	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	9 Komoditas	1,535,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	275 Ton	3,870,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,366,323,385	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %	2,635,576,092	APBD Prov	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Renstra OPD 2022-2026	Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2 Komoditas	2,635,576,092	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN	Renstra OPD 2022-2026	KSP/USP	30 KSP/USP	60 KSP/USP	90 KSP/USP	120 KSP/USP	150 KSP/USP	180 KSP/USP	853,267,761	APBD Prov	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Izin Usaha Pembukaan Kantor Koperasi	Renstra OPD 2022-2026	Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	303,486,489	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Izin Usaha Pembukaan Kantor Koperasi	Renstra OPD 2022-2026	Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	24 Koperasi	549,781,272	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	Renstra OPD 2022-2026	Unit	3766 Unit	3803 Unit	3841 Unit	3879 Unit	3918 Unit	3957 Unit	1,254,722,474	APBD Prov	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1,254,722,474	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	491,767,084	APBD Prov	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi Sehat dan Aktif	Renstra OPD 2022-2026	Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	491,767,084	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	Renstra OPD 2022-2026	Orang	525; 525 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	555; 555 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	615; 615 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	705; 705 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	750; 750 Orang Pengelola; Orang Wirausaha	14,268,207,627	APBD Prov	
2.17.05.1.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten	Renstra OPD 2022-2026	Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	960 Orang	14,268,207,627	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM	Renstra OPD 2022-2026	KUMKM	60 KUMKM	120 KUMKM	180 KUMKM	240 KUMKM	300 KUMKM	360 KUMKM	1,785,255,528	APBD Prov	
2.17.06.1.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan Hukum Atas Produk	Renstra OPD 2022-2026	KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	1,785,255,528	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	524,668,110	APBD Prov	
2.17.07.1.0 1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	524,668,110	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	Renstra OPD 2022-2026	UMKM	200 UMKM	210 UMKM	220 UMKM	231 UMKM	243 UMKM	255 UMKM	2,727,377,849	APBD Prov	
2.17.08.1.0 1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	UMKM Naik Kelas	Renstra OPD 2022-2026	UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	2,727,377,849	APBD Prov	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	10 %	10 %	12 %	12 %	15 %	2,356,237,972	APBD Prov	
2.18.02.1.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Perda/SOP Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,359,820,680	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.1.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Perda	0 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	996,417,292	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU	Renstra OPD 2022-2026	MOU/KERJA JA	2 MOU/KERJA SAMA	2 MOU/KERJA SAMA	3 MOU/KERJA SAMA	4 MOU/KERJA SAMA	5 MOU/KERJA SAMA	6 MOU/KERJA SAMA	355,308,601	APBD Prov	
2.18.03.1.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri	Renstra OPD 2022-2026	%	25 Persentase	25 Persentase	30 Persentase	50 Persentase	60 Persentase	65 Persentase	355,308,601	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU	Renstra OPD 2022-2026	%	85 %	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %	2,873,278,555	APBD Prov	
2.18.04.1.0 1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Yang Ruang Lingkupnya Daerah Kab/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	79 Nilai	79 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	85 Nilai	1,596,279,047	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.1.0 2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kewenangan Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	79 Nilai	79 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	85 Nilai	1,276,999,508	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	2,151,447,242	APBD Prov	
2.18.05.1.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,151,447,242	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	852,430,503	APBD Prov	
2.18.06.1.0 1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	852,430,503	APBD Prov	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TEHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Adminstrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.05.10.2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.0.1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBUSI SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0.9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKEMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1.0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PERKEBANGSAAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	166 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23,782,462,259	APBD Prov	
3.26.02.1.0.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,409,490,538	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.0.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSP	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,061,827,162	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.0.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19,311,144,558	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA DAN WISATAWAN NUSANTARA	Renstra OPD 2022-2026	Wisnu dan wisman	150.000 dan 15.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	9,341,888,778	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.26.03.1.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,341,888,778	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	1,3 %	2 %	3 %	3,3 %	3,5 %	4 %	4,355,024,071	APBD Prov	
3.26.04.1.0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,355,024,071	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	16,425,000,000	19,710,000,000	20,104,200,000	2,050,628,400	20,916,409,680	21,334,737,874		APBD Prov	
3.26.05.1.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,367,984,470	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	15,301,181,294	APBD Prov	
3.27.02.1.0 1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	147,692,822	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,434,745,561	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,745,697,636	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02.1.0 4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,973,045,277	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	5,047,796,740	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,047,796,740	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	2 %	18 %	16 %	14 %	12 %	1,542,501,529	APBD Prov	
3.27.04.1.0 3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,542,501,529	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	429,674,416	APBD Prov	
3.27.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429,674,416	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Renstra OPD 2022-2026	%	8,24 %	8,41 %	8,57 %	8,75 %	8,92 %	9,10 %	23,642,189,521	APBD Prov	
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	Kg/Ha	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	23,637,189,521	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	--PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Renstra OPD 2022-2026	%	1 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	19,431,052,833	APBD Prov	
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN YANG SESUAI PERUNTUKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,431,052,833	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur/(Tingkat Pengangguran Terbuka)		BPS	Persen	7,06	6,47 - 7,18	6,00 - 6,50	5,50 - 6,00	5,00 - 5,50	4,50 - 5,00		APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,882,554,370	APBD Prov	
1.01.03.1.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	35 Sekolah	1,000,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.1.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Yang Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	10 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	882,554,352	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	%	55,5 %	60 %	61 %	62 %	63 %	64 %	492,001,146	APBD Prov	
2.07.04.1.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	Renstra OPD 2022-2026	lowongan	900 lowongan	1000 lowongan	1025 lowongan	1050 lowongan	1080 lowongan	1090 lowongan	492,001,146	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	2,287,018,825	APBD Prov	
2.07.03.1.0 1	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Penyerapan Lulusan	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	80 %	1,795,313,882	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.1.0 2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	303,886,778	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.1.0 4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Renstra OPD 2022-2026	Perusahaa n	150 Perusahaan	0 Perusahaan	225 Perusahaan	250 Perusahaan	275 Perusahaan	300 Perusahaan	187,818,165	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	3,327,518,757	APBD Prov	
2.07.06.1.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3,327,518,757	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	58,241,533,607	APBD Prov	
2.07.05.1.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %	764,000,000	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.1.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Renstra OPD 2022-2026	%	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	877,533,607	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.1.0 3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Kabupten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	Renstra OPD 2022-2026	Kabupaten /Kot	1 Kabupaten/Kot a	1 Kabupaten/Ko ta	1 Kabupaten/Ko ta	1 Kabupaten/K ota	1 Kabupaten/K ota	1 Kabupaten/K ota	56,600,000,000	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,383,170,556	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,296,657	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,101,194,281	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Renstra OPD 2022-2026		0	0	1	1	1	1	883,679,619	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Renstra OPD 2022-2026	%	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %	3,036,766,060	APBD Prov	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASI JUMLAH PETANI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	Renstra OPD 2022-2026	%	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,691,522,313	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	TERBINANYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PEKEBUN	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	345,243,747	APBD Prov	DINAS PERKEBUNAN
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya													
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perusahaann	100	150	200	250	300	350		APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	3,327,518,757	APBD Prov	
2.07.06.1.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3,327,518,757	APBD Prov	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal													
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara/(Jumlah Kunjungan Wisman)		BPS	Orang	15239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		APBD	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PERKEBANGSAAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	166 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23,782,462,259	APBD Prov	
3.26.02.1.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,409,490,538	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSP	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,061,827,162	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19,311,144,558	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA DAN WISATAWAN NUSANTARA	Renstra OPD 2022-2026	Wisnu dan wisman	150.000 dan 15.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	9,341,888,778	APBD Prov	
3.26.03.1.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,341,888,778	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	1,3 %	2 %	3 %	3,3 %	3,5 %	4 %	4,355,024,071	APBD Prov	
3.26.04.1.0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,355,024,071	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	16,425,000,000	19,710,000,000	20,104,200,000	2,050,628,400	20,916,409,680	21,334,737,874		APBD Prov	
3.26.05.1.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,367,984,470	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		BPS	Orang	15.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		APBD	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PERKEBANGSAAN	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	166 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23,782,462,259	APBD Prov	
3.26.02.1.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,409,490,538	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSP	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,061,827,162	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.02.1.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19,311,144,558	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA DAN WISATAWAN NUSANTARA	Renstra OPD 2022-2026	Wisnu dan wisman	150.000 dan 15.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman	9,341,888,778	APBD Prov	
3.26.03.1.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9,341,888,778	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	1,3 %	2 %	3 %	3,3 %	3,5 %	4 %	4,355,024,071	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.26.04.1.0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,355,024,071	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	16,425,000,000	19,710,000,000	20,104,200,000	2,050,628,400	20,916,409,680	21,334,737,874		APBD Prov	
3.26.05.1.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,367,984,470	APBD Prov	DINAS PARIWISATA
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur													
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.													
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional/(Rasio Kemantapan Jalan Provinsi)		Dinas PU; BPJN Sulut	Rasio	0,89	0,894	0,899	0,903	0,908	0,912		APBD	Dinas PU; BPJN Sulut
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0 %	40 %	45 %	50 %	55 %	12,942,561,168	APBD Prov	
1.03.04.1.0 1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	12,942,561,168	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.02 .	0.06 .	0.06 .	0.07 .	0.08 .	0.08 .	16,747,147,037	APBD Prov	
1.03.05.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Tersedianya SPALD Regional	Renstra OPD 2022-2026	unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	16,747,146,737	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.53 .	0.6 .	0.68 .	0.77 .	0.86 .	0.95 .	55,270,562,696	APBD Prov	
1.03.12.1.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi yang ditetapkan dengan PERDA	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,727,437,449	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.1.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12,678,766,497	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.1.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	13,435,692,500	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.1.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	18,428,666,250	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.84 .	0.857 .	0.874 .	0.892 .	0.909 .	0.927 .	289,381,548,572	APBD Prov	
1.03.02.1.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Lokasi	24 Lokasi	5 Lokasi	4 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	27,293,700,750	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.1.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Renstra OPD 2022-2026	%	85.7 %	87.41 %	89.16 %	90.95 %	92.76 %	94.62 %	262,087,847,822	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.05 .	0.051 .	0.054 .	0.056 .	0.059 .	0.062 .	3,429,044,928	APBD Prov	
1.03.11.1.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	meningkatnya tenaga kerja konstruksi terlatih	Renstra OPD 2022-2026	Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1,083,660,329	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.1.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Tersedianya data sistem informasi pembinaan jasa konstruksi cakupan provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	345,384,601	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	15,531,073,403	APBD Prov	
1.03.06.1.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,531,073,401	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang memperoleh pengembangan infrastruktur permukiman	Renstra OPD 2022-2026	Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	38,827,683,505	APBD Prov	
1.03.07.1.0 1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,827,683,505	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang dibangun/ direhab/ direnovasi/ diubahsesuai/ dipelihara dan dirawat	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	243,084,830,675	APBD Prov	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	243,084,830,675	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,557,450	APBD Prov	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,657,450	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.89 .	0.894 .	0.899 .	0.903 .	0.908 .	0.912 .	544,227,637,560	APBD Prov	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rasio Kemantapan Jalan provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.89 .	0.894 .	0.899 .	0.903 .	0.908 .	0.912 .	544,227,637,563	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan													
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40%dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.													
10.1.1*	Rasio Gini.		BPS	Rasio	0.367	0,360	0,355	0,350	0,345	0,340		APBD	Pemerintah Daerah
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal/(Persentase pengentasan desa tertinggal)		DPMD	Persen	56	64	66	68	70	72		APBD	DPMD
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA	Renstra OPD 2022-2026	%	6,64 %	13,27 %	19.90 %	26.54 %	33.80 %	39.81 %	964,809,103	APBD Prov	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	964,809,106	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	705,957,882	APBD Prov	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	705,957,882	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Renstra OPD 2022-2026	%	22.7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,223,874,328	APBD Prov	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	5 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	3,223,434,328	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Renstra OPD 2022-2026	%	66.6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	24,049,631,845	APBD Prov	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	6 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	24,049,631,845	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri/(Prentase peningkatan status desa mandiri)		DPMD	%	10,93	14,43	17,93	21,43	24,93	28,43		APBD	DPMD
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA	Renstra OPD 2022-2026	%	6,64 %	13,27 %	19.90 %	26.54 %	33.80 %	39.81 %	964,809,103	APBD Prov	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	964,809,106	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	705,957,882	APBD Prov	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	705,957,882	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Renstra OPD 2022-2026	%	22.7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,223,874,328	APBD Prov	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	5 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	3,223,434,328	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Renstra OPD 2022-2026	%	66.6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	24,049,631,845	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	6 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	24,049,631,845	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan													
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.													
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		BPS	%	69.5	72	74	76	78	80		APBD	Dinas PUPR dan Dinsos
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	Renstra OPD 2022-2026	%	2 %	9 %	10 %	11 %	13 %	15 %	55,535,353,379	APBD Prov	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedia laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	55,535,353,379	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.02 .	0.06 .	0.06 .	0.07 .	0.08 .	0.08 .	16,747,147,037	APBD Prov	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Tersedianya SPALD Regional	Renstra OPD 2022-2026	unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	16,747,146,737	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	15,531,073,403	APBD Prov	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,531,073,401	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGERA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,954,434,132	APBD Prov	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Renstra OPD 2022-2026	Anak	0 Anak	2 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	4 Anak	106,182,716	APBD Prov	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	67 %	73 %	80 %	86 %	100 %	13,848,251,416	APBD Prov	DINAS SOSIAL
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.													
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.		Dinas Perhubungan Daerah	Persen	73.33	73.83	74.33	74.83	75.33	75.83		APBD	Dinas Perhubungan Daerah
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.41 .	0.42 .	0.45 .	0.47 .	0.49 .	0.52 .	11,246,377,673	APBD Prov	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	129,303,750	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Pemasangan rambu-rambu	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,278,940,120	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Renstra OPD 2022-2026	Terminal	0 Terminal	11 Terminal	12 Terminal	12 Terminal	12 Terminal	12 Terminal	398,259,375	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	V/C ratio di Jalan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Lokasi	0 Lokasi	5 Lokasi	7 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	854,561,377	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	V/C ratio di Jalan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	258,607,500	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	V/C ratio di Jalan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	4,440,742,515	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Angkutan Darat	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	129,303,750	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Layanan Angkutan Darat	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	9 Kegiatan	86,202,500	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Layanan Angkutan Darat	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	129,303,750	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Angkutan Darat	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Angkutan Darat	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Izin Trayek	Renstra OPD 2022-2026	izin	0 izin	150 izin	150 izin	150 izin	150 izin	150 izin	834,765,493	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Taxi	Renstra OPD 2022-2026	izin	0 Izin	200 Izin	200 Izin	200 Izin	200 Izin	200 Izin	1,556,387,543	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kegiatan layanan angkutan darat	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	150,000,000	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG)	Renstra OPD 2022-2026	Penumpang	2100 Penumpang	100 Penumpang	500 Penumpang	500 Penumpang	500 Penumpang	800 Penumpang	#VALUE!	APBD Prov	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjuang Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi UU 23 Tahun 2014)	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	0 Pertek	0 Pertek	10 Pertek	10 Pertek	10 Pertek	165,506,250	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	umlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran rakyat yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	483,326,000	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	2 Pertek	2 Pertek	2 Pertek	2 Pertek	2 Pertek	215,506,250	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara	Renstra OPD 2022-2026	sistem	0 sistem	0 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	10,775,313	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Lintas ASDP antar Kota/ Kabupaten dalam Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	329,270,382	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	665,680,282	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi ASDP antar Kota/ Kabupaten dalam Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	193,955,625	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah kegiatan Rencana Induk Pelabuhan Regional di Prov. Sulut	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	323,259,375	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.15.03.1.0 9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Ijin pembangunan Pelabuhan Regional dan tersedianya pelabuhan pengumpan regional yang layak	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	1 Pertek	0 Pertek	1 Pertek	1 Pertek	1 Pertek	1 Pertek	431,012,500	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.1 1	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Ijin Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	0 Pertek	12 Pertek	12 Pertek	12 Pertek	12 Pertek	310,329,000	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.1 2	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Ijin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	0 Pertek	10 Pertek	10 Pertek	10 Pertek	10 Pertek	172,405,000	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.1 4	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek Pekerjaan Pengerukan	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	0 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	43,101,250	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.1 5	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	0 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	21,550,625	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.1 6	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek Pengelolaan TUKS	Renstra OPD 2022-2026	Pertek	0 Pertek	0 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	5 Pertek	280,158,125	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	376,510,870	APBD Prov	
2.15.05.1.0 1	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	217,207,123	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	jumlah izin usaha	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah jalur kereta api	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 3	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	159,303,746	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 4	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 5	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Izin Operasi sarana perkeretaapian	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 6	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Penetapan Jaringan (UU 23 tahun 2007)	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah jalur kereta api	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	APBD Prov	DINAS PERHUBUNGAN
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan													
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		BNPB	Jumlah	1485.69	NA	NA	NA	NA	NA		APBD	BPBD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,606,102,210	APBD Prov	
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	15 Kegiatan	3 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	4,482,692,000	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03.1.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	123,410,210	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,009,921,497	APBD Prov	
1.05.03.1.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sesuai standar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,208,925,533	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,762,646,333	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,080,406,818	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	957,942,813	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	
1.06.06.1.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	DINAS SOSIAL
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANIA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya kegiatan penghitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.02.10.1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.10.2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.10.3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.10.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.													
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.		Dinas Lingkungan Hidup Daerah; SIPSN	Ton	40%	45%	50%	60%	70%	100%	2,516,069,114	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	0 %	40 %	45 %	50 %	55 %	12,942,561,168	APBD Prov	
1.03.04.10.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	12,942,561,168	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	70 %	2,516,069,114	APBD Prov	
2.11.11.10.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	70 %	2,516,069,114	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.		DLHD dan KLHK	IKU (Indeks Kualitas Udara)	100	90.983	90.984	90.986	90.988	90.99	857,307,439	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.10.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.10.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.10.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.10.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.10.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	477,866,787	APBD Prov	
2.11.10.10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	477,866,787	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.													
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.		Dinas PUPRD	Persen	20	20	20	20	20	20		APBD	Dinas PUPRD
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.53 .	0.6 .	0.68 .	0.77 .	0.86 .	0.95 .	55,270,562,696	APBD Prov	
1.03.12.10.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi yang ditetapkan dengan PERDA	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,727,437,449	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.10.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12,678,766,497	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.10.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	13,435,692,500	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.10.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	18,428,666,250	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang memperoleh pengembangan infrastruktur permukiman	Renstra OPD 2022-2026	Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	2 Kawasan Strategis	38,827,683,505	APBD Prov	
1.03.07.10.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,827,683,505	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang dibangun/ direhab/ direnovasi/ diubahsesuai/ dipelihara dan dirawat	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	243,084,830,675	APBD Prov	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	243,084,830,675	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,557,450	APBD Prov	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,657,450	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah													
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.		Dinas PUPRD; DLHD	Persen	100	100	100	100	100	100		APBD	Dinas PUPRD; DLHD
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	0.53 .	0.6 .	0.68 .	0.77 .	0.86 .	0.95 .	55,270,562,696	APBD Prov	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi yang ditetapkan dengan PERDA	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,727,437,449	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12,678,766,497	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	13,435,692,500	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Renstra OPD 2022-2026	%	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	18,428,666,250	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,557,450	APBD Prov	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,657,450	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.													
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.		Dinas PUPRD	%	100	100	100	100	100	100		APBD	Dinas PUPRD
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang dibangun/ direhab/ direnovasi/ diubahsesuai/ dipelihara dan dirawat	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	243,084,830,675	APBD Prov	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	243,084,830,675	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,557,450	APBD Prov	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,540,657,450	APBD Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab													
Target 12.3 12.4 Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.													
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.		SIPSN	Persen	35.06	36.06	37.06	38.06	39.06	40.06		APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.11.02.1.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	70 %	2,516,069,114	APBD Prov	
2.11.11.1.0 1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	70 %	2,516,069,114	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya/(Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota)		Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha/Ke giatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan		APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingku gan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha/Ke giatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	411,808,764	APBD Prov	
2.11.05.1.0 1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan usaha pengupulan limbah B3 Lintas Kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	411,808,764	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	70 %	2,516,069,114	APBD Prov	
2.11.11.1.0 1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	70 %	2,516,069,114	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 13. Perubahan Iklim													
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara													
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.		BPBD	Jumlah	1485.69	NA	NA	NA	NA	NA		APBD	BPBD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,920,124,122,737	APBD Prov	
1.01.02.1.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	216 Sekolah	216 Sekolah	217 Sekolah	218 Sekolah	219 Sekolah	220 Sekolah	1,515,109,709,387	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	Sekolah	185 Sekolah	185 Sekolah	186 Sekolah	187 Sekolah	188 Sekolah	189 Sekolah	1,463,289,413,350	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	941,725,000,000	APBD Prov	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Renstra OPD 2022-2026	%	80.39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,371,961,982,163	APBD Prov	
1.02.02.1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"	Renstra OPD 2022-2026	%	1). 4; 2) 52,2 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 55 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 57,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 62,5 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 65 1) RS; 2) %	386,580,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	856,259,732,487	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,900,000,000	APBD Prov	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Renstra OPD 2022-2026	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	113,222,249,675	APBD Prov	DINAS KESEHATAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	5,299,717,481	APBD Prov	
1.04.02.1.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,522,438,190	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,286,517,322	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,693,050,669	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	797,711,302	APBD Prov	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP)	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,606,102,210	APBD Prov	
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	15 Kegiatan	3 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	4,482,692,000	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03.1.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	123,410,210	APBD Prov	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,009,921,497	APBD Prov	
1.05.03.1.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sesuai standar	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,208,925,533	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,762,646,333	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,080,406,818	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	957,942,813	APBD Prov	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	
1.06.06.1.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,199,548,964	APBD Prov	DINAS SOSIAL
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Renstra OPD 2022-2026	%	25 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	4,518,130,444	APBD Prov	
2.08.02.1.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	1,218,130,444	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,900,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,400,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	Renstra OPD 2022-2026	%	14.03 %	12.03 %	10.03 %	8.03 %	6.03 %	4.03 %	1,317,788,047	APBD Prov	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	307,788,047	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Renstra OPD 2022-2026	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1,010,000,000	APBD Prov	DINAS PANGAN
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya kegiatan penghitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Renstra OPD 2022-2026		0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	1,564,595,892	APBD Prov	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TERSEDIAANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,564,595,892	APBD Prov	DINAS PERTANIAN
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional													
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.		BPS, BPPIKHL, DLH 15 Kab/Kota, Dinas Kehutanan , Dinas pertanian dan peternakan, Dinas Perindustrian, Pertamina, PLN, PT CONCH	%	50	60	70	80	90	100	857,307,439	DAU	DLHD
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 14. Ekosistem lautan													
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi													
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbang ke laut.		DKPD; DLHD	Pendataan	Belum Terdata	Belum Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata			DKPD; DLHD
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	RPPLH dan KLHS	1,976,682,069	APBD Prov	
2.11.02.1.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,002,501,020	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	974,181,049	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	IKLH	70,51 IKLH	70,81 IKLH	71,11 IKLH	71,41 IKLH	71,71 IKLH	72,01 IKLH	2,481,497,608	APBD Prov	
2.11.03.1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,267,307,439	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	390,000,000	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	824,190,169	APBD Prov	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Target 14.2 Pada tahun 2030, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif													
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.		Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100		APBD	DKP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100		APBD	DKP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUIDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Adminstrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUIDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUIDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUIDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Kg	65	67	67.5	68	70	72	#VALUE!	APBD Prov	
3.25.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	790,408,139	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.06.1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	JUMLAH REKOMENDASI SKP/SERTIFIKAT SKP	Renstra OPD 2022-2026	Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1,618,904,351	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	LAPORAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBU SI IKAN LINTAS DAERAH	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	853,333,812	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	150 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	400 Dokumen	450 Dokumen	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN 10 - 30GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Izin	30 Izin	0 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	30 Izin	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL YANG TERDAFTAR	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	Renstra OPD 2022-2026	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMAPI DENGAN 10 GT DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	DOKUMEN/REKOMENDA SI PERIZINAN KAPAL	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG TERDAFTAR DI PUD (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya													
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman/jumlah total produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan (pud) dari seluruh kab/kota di wilayah prov sulut		Dinas Kelautan dan Perikanan	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton		APBD	DKP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa keputuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftar kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia													
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut/(Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan)		Dinas Kelautan dan Perikanan	hektar	164,251.94	190,776.81	234,886.92	234,886.92	234,886.92	234,886.92		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	40 %	45 %	55 %	75 %	92 %	100 %	8,086,571,255	APBD Prov	
3.25.02.1.0 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	REVISI PERDA WILAYAH LAUT YANG DI REHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,479,691,698	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	JUMLAH IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI (INDIKATOR MANDIRI)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.0 3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG MANDIRI	Renstra OPD 2022-2026	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3,106,879,557	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	Renstra OPD 2022-2026	Ton	405.500 Ton	410.000 Ton	410.380 Ton	412.431 Ton	415.000 Ton	417.075 Ton	66,111,973,175	APBD Prov	
3.25.03.1.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut	Renstra OPD 2022-2026	WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	2 WPP	18,689,652,941	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.03.1.0 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Renstra OPD 2022-2026	Dok	150 Dok	250 Dok	300 Dok	350 Dok	400 Dok	450 Dok	6,459,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	630,534,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	30 Kapal	0 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	30 Kapal	277,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal yang terdaftar	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	100 Kapal	0 Kapal	150 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	200 Kapal	280,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38,801,922,032	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,999,202	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Izin	1 Izin	0 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	250,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.0 9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248,865,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.1 0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Renstra OPD 2022-2026	Kapal	50 Kapal	0 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	50 Kapal	235,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Renstra OPD 2022-2026	Ton	544.839 Ton	561.185 Ton	578.020 Ton	595.361 Ton	625.129 Ton	656.385 Ton	19,182,795,754	APBD Prov	
3.25.04.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL LAUT (DILUAR MINMYAK DAN GAS BUMI) YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TEHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	303,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Adminstrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	249,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	218,000,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSEDIA NYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17,836,795,754	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	8,645,644,449	APBD Prov	
3.25.05.1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN WILAYAH PESISIR	Renstra OPD 2022-2026	Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	8,137,384,449	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.25.05.1.0 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Renstra OPD 2022-2026	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	508,260,000	APBD Prov	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tujuan 15. Ekosistem daratan													
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.													
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan/(Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat)		Dinas Kehutanan	Ha	2368	2368	2368	2368	2368	2368			Dishut
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	1,39 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	61,639,060,632	APBD Prov	
3.28.03.1.0 1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5,835,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	1,290,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	3,515,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1325 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	38,210,663,132	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	8,388,795,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,650,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	857,882,500	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 8	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Kawasan hutan dengan Tujuan Khusus Wisata Religi/Rohani (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 9	Perbenihan Tanaman Hutan	Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	1,746,720,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Renstra OPD 2022-2026	%	19,77 %	25,58 %	31,40 %	37,21 %	43,02 %	48,84 %	3,976,896,068	APBD Prov	
3.28.05.1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	3,976,896,068	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
		LUAS HUTAN YANG DIREHABILITASI DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	Renstra OPD 2022-2026	Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	-	APBD Prov	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	3,765,108,703	APBD Prov	
3.28.04.1.0 1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	2,665,108,703	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 2	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	250,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 3	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	850,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	847,149,458	APBD Prov	
3.28.06.1.0 1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	DAS	0 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	847,149,458	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.													

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk kategori maju/(Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi))		Dinas Kehutanan	Persen	30	29	28	27	26	25		APBD	Dishut
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	1,39 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	61,639,060,632	APBD Prov	
3.28.03.1.0 1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5,835,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	1,290,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	3,515,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1325 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	38,210,663,132	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	8,388,795,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,650,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	857,882,500	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 8	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Kawasan hutan dengan Tujuan Khusus Wisata Religi/Rohani (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 9	Perbenihan Tanaman Hutan	Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	1,746,720,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Renstra OPD 2022-2026	%	19,77 %	25,58 %	31,40 %	37,21 %	43,02 %	48,84 %	3,976,896,068	APBD Prov	
3.28.05.1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	3,976,896,068	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
		LUAS HUTAN YANG DIREHABILITASI DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	Renstra OPD 2022-2026	Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	-	APBD Prov	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	3,765,108,703	APBD Prov	
3.28.04.1.0 1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	2,665,108,703	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 2	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	250,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 3	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	850,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	847,149,458	APBD Prov	
3.28.06.1.0 1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	DAS	0 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	847,149,458	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi													
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan/(Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis)		Dinas Kehutanan	Ha	1325	600	600	600	600	600		APBD	Dishut
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	1,39 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %	61,639,060,632	APBD Prov	
3.28.03.1.0 1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5,835,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	1,290,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.28.03.1.0 3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	3,515,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1325 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	38,210,663,132	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	8,388,795,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,650,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	857,882,500	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 8	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Kawasan hutan dengan Tujuan Khusus Wisata Religi/Rohani (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 9	Perbenihan Tanaman Hutan	Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	1,746,720,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Renstra OPD 2022-2026	%	19,77 %	25,58 %	31,40 %	37,21 %	43,02 %	48,84 %	3,976,896,068	APBD Prov	
3.28.05.1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	3,976,896,068	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
		LUAS HUTAN YANG DIREHABILITASI DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	Renstra OPD 2022-2026	Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	-	APBD Prov	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	3,765,108,703	APBD Prov	
3.28.04.1.0 1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	2,665,108,703	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 2	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	250,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 3	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	850,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	847,149,458	APBD Prov	
3.28.06.1.0 1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	DAS	0 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	847,149,458	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan													
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.			Situs	•Eagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batuangus; •Taman wisata alam batu putih dan batu angus; •Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; •Suaka marga satwa manembo-nembo;	•Eagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batuangus; •Taman wisata alam batu putih dan batu angus; •Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; •Suaka marga satwa manembo-nembo;	•Eagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batuangus; •Taman wisata alam batu putih dan batu angus; •Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; •Suaka marga satwa manembo-nembo;	•Eagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batuangus; •Taman wisata alam batu putih dan batu angus; •Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; •Suaka marga satwa manembo-nembo;	•Eagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batuangus; •Taman wisata alam batu putih dan batu angus; •Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; •Suaka marga satwa manembo-nembo;	•Eagar alam teluk apar, gunung dua saudara, gunung lokon, dan tangkoko batuangus; •Taman wisata alam batu putih dan batu angus; •Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken; •Suaka marga satwa manembo-nembo;			Dishut; WCS
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	- Taman wisata alam batu putih dan batu	- Taman wisata alam batu putih dan batu	- Taman wisata alam batu putih dan batu	- Taman wisata alam batu putih dan batu	- Taman wisata alam batu putih dan batu	- Taman wisata alam batu putih dan batu	61,639,060,632	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
3.28.03.1.0 1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	· Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken;	· Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken;	· Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken;	· Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken;	· Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken;	· Taman nasional bogani nani wartabone dan bunaken;	5,835,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Renstra OPD 2022-2026	PKH	· Suaka marga satwa manembo-nembo;	· Suaka marga satwa manembo-nembo;	· Suaka marga satwa manembo-nembo;	· Suaka marga satwa manembo-nembo;	· Suaka marga satwa manembo-nembo;	· Suaka marga satwa manembo-nembo;	1,290,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	3,515,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1325 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	600 Ha	38,210,663,132	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	8,388,795,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,650,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	857,882,500	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 8	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Kawasan hutan dengan Tujuan Khusus Wisata Religi/Rohani (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.03.1.0 9	Perbenihan Tanaman Hutan	Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	4 Sertifikat	1,746,720,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Renstra OPD 2022-2026	%	19,77 %	25,58 %	31,40 %	37,21 %	43,02 %	48,84 %	3,976,896,068	APBD Prov	
3.28.05.1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)	Renstra OPD 2022-2026	KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	3,976,896,068	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
		LUAS HUTAN YANG DIREHABILITASI DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	Renstra OPD 2022-2026	Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	2400 Ha	-	APBD Prov	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Renstra OPD 2022-2026	%	30 %	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	3,765,108,703	APBD Prov	
3.28.04.1.0 1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (Permendari 86/2017)	Renstra OPD 2022-2026	TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	1 TAHURA	2,665,108,703	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 2	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	PKH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	6 KPH	250,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.04.1.0 3	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Mandiri)	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	850,000,000	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	847,149,458	APBD Prov	
3.28.06.1.0 1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	DAS	0 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	1 DAS	847,149,458	APBD Prov	DINAS KEHUTANAN
Tujuan 16. Perdamatan, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh													
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak.													
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.		Dinas P3A	Persen	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03			Dinas P3A
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,241,569,642	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	2,527,976,606	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	
2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Renstra OPD 2022-2026	Media Masa	2 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	676,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi		Dinas P3A	Angka	0.71	0.71	0.65	0.6	0.55	0.55			Dinas P3A
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,241,569,642	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	2,527,976,606	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	
2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Renstra OPD 2022-2026	Media Masa	2 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	676,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.													
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi/(Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kepolisian Resort dan Kepolisian Daerah)		Polda	Angka	7140	NA	NA	NA	NA	NA			Polda
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,241,569,642	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	2,527,976,606	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Renstra OPD 2022-2026	Media Masa	2 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	676,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.													
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.		BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			Inspektorat;
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini Laporan Keuangan	Renstra OPD 2022-2026	WTP .	WTP .	WTP .	WTP .	WTP .	WTP .	WTP .	30,824,470,411	APBD Prov	
6.01.02.1.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Renstra OPD 2022-2026	LHP	137 LHP	137 LHP	137 LHP	137 LHP	137 LHP	137 LHP	25,857,486,335	APBD Prov	INSPEKTORAT
6.01.02.1.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,966,984,075	APBD Prov	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,560,530,247	APBD Prov	
6.01.03.1.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan Pengawasan	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	806,234,493	APBD Prov	INSPEKTORAT
6.01.03.1.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Movev	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	3,754,295,753	APBD Prov	INSPEKTORAT
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B/(Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi)		Inspektorat	NILAI	BB	BB	BB	BB	BB	BB			Inspektorat;
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	NILAI LPPD	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Sangat Tinggi Nilai	Sangat Tinggi Nilai	Sangat Tinggi Nilai	3,938,964,815	APBD Prov	
4.01.03.1.0 1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan	Renstra OPD 2022-2026	Segmen Batas	1 Segmen Batas	1 Segmen Batas	18 Segmen Batas	18 Segmen Batas	18 Segmen Batas	18 Segmen Batas	1,090,947,154	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.1.0 2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase pelaksanaan otonomi Daerah	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,071,992,261	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.1.0 3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	812,920,606	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B/(Indeks Reformasi Birokrasi)		PAN RB	NILAI	57,48	59,95	61,00	62,50	64,00	65,00			Biro Organisasi
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Rerformasi Birokrasi	Renstra OPD 2022-2026	Angka Indek	57.48 Angka Indeks	59.95 Angka Indeks	61.00 Angka Indeks	62.50 Angka Indeks	64.00 Angka Indeks	65.00 Angka Indeks	9,724,075,041	APBD Prov	
4.01.02.1.0 1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Kematangan Organisasi	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	41.03 Nilai	42.03` Nilai	43.03 Nilai	44.03 Nilai	45.03 Nilai	46.03 Nilai	3,576,262,559	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.1.0 2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Pelayanan Publik	Renstra OPD 2022-2026	Angka Indek	7.71 Angka Indeks	7.81 Angka Indeks	7.91 Angka Indeks	8.01 Angka Indeks	8.11 Angka Indeks	8.21 Angka Indeks	1,160,787,812,481	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik/(Indeks Pelayanan Publik)		Setda	NILAI	7,81	7,81	7,91	8,01	8,11	8,21			Biro Organisasi
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Rerformasi Birokrasi	Renstra OPD 2022-2026	Angka Indek	57.48 Angka Indeks	59.95 Angka Indeks	61.00 Angka Indeks	62.50 Angka Indeks	64.00 Angka Indeks	65.00 Angka Indeks	9,724,075,041	APBD Prov	
4.01.02.1.0 1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Kematangan Organisasi	Renstra OPD 2022-2026	Nilai	41.03 Nilai	42.03` Nilai	43.03 Nilai	44.03 Nilai	45.03 Nilai	46.03 Nilai	3,576,262,559	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.1.0 2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Pelayanan Publik	Renstra OPD 2022-2026	Angka Indek	7.71 Angka Indeks	7.81 Angka Indeks	7.91 Angka Indeks	8.01 Angka Indeks	8.11 Angka Indeks	8.21 Angka Indeks	1,160,787,812,481	APBD Prov	SEKRETARIAT DAERAH
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.													
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		BPS	Persen	26.65	26.65	26.65	26.65	NA	NA			Setwan; DP3A; Kesbangpol
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	140,989,117,938	APBD Prov	
4.02.02.1.0 1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,585,693,960	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.1.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	13,286,074,624	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.1.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	36,541,808,624	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.1.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	25,591,937,522	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.1.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31,934,439,003	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
4.02.02.1.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,263,113,496	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.1.0 7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	Renstra OPD 2022-2026	Dokumen	1 Doukumen	1 Doukumen	1 Doukumen	1 Doukumen	1 Doukumen	1 Doukumen	3,093,621,547	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.1.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	11,692,429,162	APBD Prov	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.													
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur/(Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran)		Disdukcapil dan KB; Susenas Maret 2021	%	73.34	73.34	74	74.34	75	75.34		APBD	Disdukcapil dan KB
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	97.5 %	98 %	98.5 %	98.5 %	99 %	1,682,910,017	APBD Prov	
2.12.02.1.0 1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	347,991,547	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.02.1.0 2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	629,565,212	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.02.1.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	705,353,258	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAJ)	Renstra OPD 2022-2026	%	68 %	70 %	72.5 %	75 %	77.5 %	80 %	2,465,932,390	APBD Prov	
2.12.03.1.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	359,082,728	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03.1.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,331,499,406	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03.1.0 3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaran Pencatatan Sipil	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	775,350,256	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun		Disdukcapil dan KB; Susenas Maret 2021	Persen	90.15	90.15	92.15	93.15	94.15	95.15		APBD	Disdukcapil dan KB
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	Renstra OPD 2022-2026	%	95 %	97.5 %	98 %	98.5 %	98.5 %	99 %	1,682,910,017	APBD Prov	
2.12.02.1.0 1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	347,991,547	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.02.1.0 2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	629,565,212	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.02.1.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	705,353,258	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAJ)	Renstra OPD 2022-2026	%	68 %	70 %	72.5 %	75 %	77.5 %	80 %	2,465,932,390	APBD Prov	
2.12.03.1.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	359,082,728	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03.1.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,331,499,406	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03.1.0 3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaran Pencatatan Sipil	Renstra OPD 2022-2026	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	775,350,256	APBD Prov	DINAS KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.													
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.		-	Pendataan	Belum Terdata	Belum Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		APBD	JIPS
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	28,034,972,760	APBD Prov	
2.16.03.1.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	331,790,003	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.16.03.1.0 2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem <u>penghubung layanan pemerintah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	27,703,182,757	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<u>Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	203,878,632	APBD Prov	
2.20.02.1.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi <u>Pembangunan Daerah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	203,878,632	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<u>RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)</u>	Renstra OPD 2022-2026	Rasio	31 Rasio	29 Rasio	28 Rasio	26 Rasio	24 Rasio	22 Rasio	4,494,598,515	APBD Prov	
2.08.03.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah <u>dievaluasi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725,052,266	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah <u>terstandarisasi</u>	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	1,241,569,642	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	2,527,976,606	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<u>PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	51 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	2,353,192,939	APBD Prov	
2.08.07.1.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan <u>kekerasan terhadap anak</u>	Renstra OPD 2022-2026	Media Masa	2 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	5 Media Masa	676,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,176,596,471	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.1.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah <u>kab/kota</u>	Renstra OPD 2022-2026	Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	500,000,000	APBD Prov	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi		DKIPS; Polda	Kasus	20	20	20	20	20	20		APBD	DKIPS; Polda
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<u>PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	28,034,972,760	APBD Prov	
2.16.03.1.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah <u>Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	331,790,003	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.1.0 2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem <u>penghubung layanan pemerintah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	27,703,182,757	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<u>Tingkat keamanan informasi pemerintah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	899,709,294	APBD Prov	
2.21.02.1.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan <u>strategi yang harus diamankan</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	664,450,475	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.21.02.1.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi <u>sandi</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	66 %	80 %	75 %	80 %	85 %	90 %	235,258,818	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Tujuan 17. Komitran untuk mencapai tujuan													
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan <u>pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional</u>													
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan <u>evaluasi pembangunan nasional</u> .		BPS	Persen	97.25	100	100	100	100	100		APBD	BPS
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<u>PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	28,034,972,760	APBD Prov	
2.16.03.1.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah <u>Provinsi</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	331,790,003	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kd. Indikator	Nama Indikator	Indikator Program/Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian					Indikatif alokasi anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Terkait
						2022	2023	2024	2025	2026			
2.16.03.1.0 2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem <u>penghubung layanan pemerintah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	27,703,182,757	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan <u>pembangunan daerah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	203,878,632	APBD Prov	
2.20.02.1.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi <u>Pembangunan Daerah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	203,878,632	APBD Prov	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keterukuran dan Akurasi <u>Dokumen Perencanaan Pembangunan</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	13,258,145,033	APBD Prov	
5.01.02.1.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan <u>Pembangunan Daerah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,829,937,169	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.02.1.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Data dan Informasi <u>Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,450,479,630	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.02.1.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dan tersedianya pelaporan hasil <u>pelaksanaan pembangunan daerah</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,977,728,232	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar <u>Dokumen Perencanaan Pembangunan</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	29,221,513,163	APBD Prov	
5.01.03.1.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6,101,981,394	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.03.1.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan <u>Bidang Perekonomian dan SDA</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,518,239,854	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.03.1.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan <u>Kewilayahan</u>	Renstra OPD 2022-2026	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,601,291,913	APBD Prov	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Tabel 5.2 Matriks Dukungan Program dan Kegiatan Non-Pemerintah

NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
1	CARGILL INDONESIA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Desa Ekowisata Kapitu	Menjadikan Desa Kapitu sebagai destinasi wisata dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif	Orang	Kelompok masyarakat yg terbentuk memiliki pengetahuan yg cukup dalam mendukung program Desa Ekowisata dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi kreatif di kelompok	Lihat di file roadmap	Lihat di file roadmap	Lihat di file roadmap	Lihat di file roadmap	2.858.255.400	Dana CSR PT. CARGILL INDONESIA	Sulawesi Utara
2	CARGILL INDONESIA	Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	Budidaya Jamur Tiram Putih dengan Media sabut kelapa	Pelatihan bagi kelompok perempuan	Orang	Produksi jamur Tiram putih 50kg per hari	1. Training peningkatan kualitas jamur tiram putih, 2. Pelatihan pembuatan produk turunan jamur	Sertifikasi Halal dan BPOM	Exit Program	-	1.038.075.000	CSR PT. CARGILL INDONESIA	Sulawesi Utara
3	CARGILL INDONESIA	Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak	MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT UNTUK LAYANAN DASAR	Perbaikan Drainase dan Pembuatan Toilet Komunal	Drainase dan toilet komunal	Unit	862 m drainase berfungsi dengan baik dan terbangunnya 4 Unit toilet komunal	-	-	-	-	813.285.000	CSR PT. CARGILL INDONESIA	Sulawesi Utara
4	CARGILL INDONESIA	Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	Program Produksi Minyak Kelapa Yang Berkelanjutan	Meberikan peningkatan ekonomi petani melalui peningkatan produktifitas dan praktek pertanian yang berkelanjutan	Orang	200 petani dapat tersertifikasi	Penambahan Jumlah petani yg tersertifikasi	Penambahan Jumlah petani yg tersertifikasi	Penambahan jumlah petani yang tersertifikasi	-	1.653.286.725	CSR PT. Cargill Indonesia	Sulawesi Utara
5	PT. BANK SULUTGO	Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak	MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT UNTUK LAYANAN DASAR	Pembangunan water tower di universitas klabat	Volume air	Liter	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	750.000.000	TJS BSG	Sulawesi Utara
6	PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL MANADO	Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Bantuan pembangunan rumah ibadah	Bahan bangunan	Dos	Pembangunan rumah ibadah	Pemberantasan kemiskinan	Pemberantasan kemiskinan	Peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat	7.000.000.000	0.2% Laba usaha Kanwil	Sulawesi Utara
7	PT ANGKASA PURA I BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI	Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Bantuan Gasebo Pendukung Sarana Prasarana Pariwisata di Pantai Pulisan.	Gasebo	unit	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	24.000.000	TJSL	Sulawesi Utara



NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
8	BANK BRI WILAYAH MANADO	Tujuan 5. Kesenjangan gender	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	BRI Peduli Woman Communi-Tree Chapter II	Pupuk	Benih Bunga	-	-	-	-	-	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
9	BANK BRI WILAYAH MANADO	Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT UNTUK LAYANAN DASAR	Pemberian BantuanSound system GMIM Pasino'owan Koreng Wilayah Tareran 1	Sound System	Sound System	-	-	-	-	-	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
10	BANK BRI WILAYAH MANADO	Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT UNTUK LAYANAN DASAR	Pemberian Bantuan Sound system GMIM Tiberias Kinir	Sound System	Sound System	-	-	-	-	-	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
11	YAYASAN BUMI TANGGUH (YBT)	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Fasilitasi penetapan kawasan konservasi laut daerah	Peta penetapan kawasan konservasi laut daerah	Kawasan/de sa	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	-	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	250.000.000	WCS dan sumber lain yang tidak mengikat	Sulawesi Utara
12	PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL MANADO	Tujuan 15. Ekosistem daratan	-	Pegadaian Green Live Action	Bibit	Buah	Pembangunam infrastruktur untuk fasilitas umum	-	Pengembangan Tempat Usaha dengan program kemitraan	Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Pemberdayaan Mahasiswa Berprestasi untuk mendapatkan pelatihan	7.000.000.000	Pegadaian Pusat	Sulawesi Utara
13	PT. BANK SULUTGO	Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau	MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT UNTUK LAYANAN DASAR	Pembangunan Water Tower Universitas Klabat	Air Bersih	Liter	40.000 liter	60.000 liter	60.000 liter	80.000 liter	80.000 liter	-	CSR Perusahaan	Sulawesi Utara
14	SWARA PARANGPUAN G	Tujuan 5. Kesenjangan gender	MEMBERIKAN AKSES YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT UNTUK LAYANAN DASAR	Pendidikan Kritis dan Informasi tentang Kesenjangan dan Keadilan Gender bagi Kelompok Perempuan dan Advokasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara	Adanya pengetahuan dan informasi terkait Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	Jumlah kasus KTP & Anak berkurang	Jumlah kasus KTP&Anak berkurang	Jumlah kasus KTP&Anak berkurang	Jumlah kasus KTP&Anak berkurang	Jumlah kasus KTP&Anak berkurang	500.000.000	Swadaya dan Funding	Sulawesi Utara



NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
15	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Penyusunan dan pengesahan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita tersusun dan tersahkan	Peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita tersusun dan tersahkan	Dokumen	Pengesahan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita	-	-	-	-	87.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
16	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengintegrasian rencana pengembangan sumber daya perikanan gurita dengan RPJMDesa	Rencana pengembangan sumber daya perikanan gurita terintegrasikan dengan RPJMDesa	Dokumen	Pelatihan tim penyusun RPJMDesa	- Penyusunan draft RPJMDesa - Pengesahan draft RPJMDesa	-	-	-	135.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
17	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Dimulainya atau diperluasnya penutupan sementara perikanan gurita	Penutupan sementara perikanan gurita dimulai atau diperluas	Siklus penutupan sementara perikanan gurita	"- Desa Bulutui melakukan 2 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Gangga Satu melakukan 2 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Likupang Dua melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita"	"- Desa Bulutui melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Gangga Satu melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Likupang Dua melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita"	-	-	-	84.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
18	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN MODAL MANUSIA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN	Pembentukan kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC)	Kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC) terbentuk	Kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC)	- Kelompok Batu Woka Sejahtera terbentuk di Desa Likupang Dua	-	-	-	-	96.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
19	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengembangan sistem pengelolaan Rumah Boboca	Sistem pengelolaan Rumah Boboca yang dapat diimplementasikan di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Sistem pengelolaan Rumah Boboca	- Pelatihan sistem pengelolaan Rumah Boboca untuk kelompok Napo Ila Indah, Sawang Indah, dan Batu Woka Sejahtera	- Pelatihan sistem pengelolaan Rumah Boboca untuk kelompok Napo Ila Indah, Sawang Indah, dan Batu Woka Sejahtera	-	-	-	60.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
20	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN MODAL MANUSIA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN	Pengambilan data perikanan gurita partisipatif	Data perikanan gurita diambil secara partisipatif	Pengumpul gurita di tingkat desa	"- Desa Bulutui melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Gangga Satu melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Likupang Dua melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif"	"- Desa Bulutui melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Gangga Satu melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif - Desa Likupang Dua melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif"	-	-	-	472.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara



NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
21	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	MENINGKATKAN MODAL MANUSIA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN	Pembentukan kelompok simpan di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Kelompok simpan terbentuk di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Kelompok simpan	- Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mulai kegiatan menabung	- Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua meneruskan kegiatan menabung	-	-	-	78.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
22	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	MENINGKATKAN MODAL MANUSIA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN	Peningkatan kapasitas kelompok simpan	Kelompok simpan mampu secara mandiri mengelola kelompoknya	Kelompok simpan yang mandiri	- Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mampu mengelola kelompoknya secara mandiri	-	-	-	-	82.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
23	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	Pengembangan unit usaha kelompok pengelola Rumah Boboca (temporary closure)	Kelompok pengelola Rumah Boboca (temporary closure) memulai unit usahanya sendiri	Unit usaha kelompok pengelola Rumah Boboca (temporary closure)	- Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan hasil perikanan gurita	- Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan hasil perikanan gurita	-	-	-	292.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
24	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Kajian kebijakan perikanan untuk mendukung penyuaran dan integrasi gurita sebagai unggulan	Adanya dokumen kajian kebijakan perikanan gurita	Dokumen kajian	- Draft awal kajian kebijakan perikanan gurita	- Draft akhir kajian kebijakan perikanan gurita	-	-	-	25.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
25	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Menyelenggarakan forum dialog provinsi melalui sektor perikanan dan kelautan serta sektor-sektor yang relevan lainnya untuk harmonisasi pengelolaan ruang laut dan perikanan Pemprov dengan pengelolaan perikanan masyarakat	Forum dialog provinsi melalui sektor perikanan dan kelautan serta sektor-sektor yang relevan lainnya untuk harmonisasi pengelolaan ruang laut dan perikanan Pemprov dengan pengelolaan perikanan masyarakat terselenggara	Forum dialog di tingkat provinsi	- Diskusi revisi RZWP3K dan integrasinya ke dalam RTRWP Sulawesi Utara	-	-	-	-	60.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
26	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Menyelenggarakan forum nasional dengan para pihak terkait dengan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di berbagai provinsi untuk mempresentasikan berbagai macam model pengelolaan perikanan di berbagai tempat	Forum nasional dengan para pihak terkait dengan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di berbagai provinsi untuk mempresentasikan berbagai macam model pengelolaan perikanan di berbagai tempat terselenggara	Forum nasional di tingkat pusat	- Forum nasional terselenggara di Jakarta/Bogor	-	-	-	-	174.700.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara



NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
27	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan data transdisipliner terdiri dari komponen sosio-ekologi utama, termasuk perikanan demersal skala kecil, pengurangan risiko bycatch duyung di titik-titik panas (tumpang tindih antara daerah penangkapan ikan dan daerah penampakan dugong)	Data transdisipliner terdiri dari komponen sosio-ekologi utama, termasuk perikanan demersal skala kecil, pengurangan risiko bycatch duyung di titik-titik panas (tumpang tindih antara daerah penangkapan ikan dan daerah penampakan dugong) terkumpul	Set data sosio-ekologi	Data sosio-ekologi terkumpul	-	-	-	-	7.700.000	CEPF	Sulawesi Utara
28	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Penyusunan draf rencana pengelolaan CB-MPA yang dibuat dengan pendekatan ko-kreasi	Draf rencana pengelolaan CB-MPA yang dibuat dengan pendekatan ko-kreasi	Draf rencana pengelolaan CB-MPA	Draf rencana pengelolaan CB-MPA	-	-	-	-	28.900.000	CEPF	Sulawesi Utara
29	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Penyepakatan mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur melalui mekanisme Dana Desa	Mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur melalui mekanisme Dana Desa disepakati	Mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur	- Pembentukan Pokdarwis di Bukide Timur dengan pembiayaan dari Dana Desa	-	-	-	-	5.400.000	CEPF	Sulawesi Utara
30	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya teripang di Bulu	Sarana dan prasarana budidaya teripang tersedia di Bulu	Paket sarana dan prasarana budidaya teripang	- Sarana dan prasarana budidaya teripang	-	-	-	-	3.200.000	CEPF	Sulawesi Utara
31	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN MODAL MANUSIA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN	Membangun kapasitas masyarakat di Bulu untuk budidaya teripang	Terbangunnya kapasitas masyarakat di Bulu untuk budidaya teripang	Orang anggota kelompok/k operasi	- Pelatihan pengolahan hasil budidaya teripang	-	-	-	-	31.100.000	CEPF	Sulawesi Utara
32	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN MODAL MANUSIA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN	Penyiapan rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang	Rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang disiapkan	Rencana bisnis teripang	"- Draf rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang - Penyepakatan draf rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang oleh anggota koperasi"	-	-	-	-	23.100.000	CEPF	Sulawesi Utara



NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
33	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pembangunan sistem pengelolaan pengetahuan ekosistem lamun dan pesisir	Adanya sistem pengelolaan pengetahuan ekosistem lamun dan pesisir	Nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam hal penelitian ekosistem pesisir dan kerja praktek (magang) mahasiswa	Nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam hal penelitian ekosistem pesisir dan kerja praktek (magang) mahasiswa	-	-	-	-	19.200.000	CEPF	Sulawesi Utara
34	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan informasi sosio-ekologis yang relevan untuk formalisasi CB-MPA untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait	Informasi sosio-ekologis yang relevan untuk formalisasi CB-MPA dikumpulkan, dikomunikasikan dan dipublikasikan di saluran yang relevan	Naskah akademik	- Naskah akademik	- Naskah akademik	-	-	-	9.500.000	CEPF	Sulawesi Utara
35	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan informasi dugong menggunakan kuesioner terstandarisasi	Informasi dugong menggunakan kuesioner terstandarisasi terkumpul	Set data	-	-	-	-	-	10.000.000	IKI	Sulawesi Utara
36	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan informasi karbon biru dalam sedimen lamun	Informasi karbon biru dalam sedimen lamun terkumpul	Set data	"- Sampel sedimen terkumpul - Sampel sedimen teranalisis"	- Penulisan laporan terkait data karbon biru	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
37	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan informasi jasa lingkungan ekosistem lamun menggunakan metode B/RUV	Informasi jasa lingkungan ekosistem lamun menggunakan metode B/RUV terkumpul	Set data	"- Footage terkumpul - Footage teranalisis"	- Penulisan laporan terkait data jasa lingkungan ekosistem lamun	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
38	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan informasi populasi dugong melalui survey drone	Informasi populasi dugong melalui survey drone terkumpul	Set data	"- Pilot drone terlatih dan tersertifikasi APDI - Pilot drone terlatih dalam metode pengambilan sampel dan rencana terbang penelitian"	"- Data sampel terambil - Data teranalisis - Penulisan laporan terkait survey drone"	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
39	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MEMANFAATKAN MODAL WILAYAH	Pengumpulan informasi lamun melalui metode seagrasswatch	Informasi lamun melalui metode seagrasswatch terkumpul	Set data	- Latihan pengambilan data menggunakan metode seagrasswatch	"- Data sampel terambil - Data teranalisis - Penulisan laporan terkait seagrasswatch"	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara



NO	Nama Lembaga/ Perusahaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar	Asas Manfaat	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
40	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	Inisiasi model usaha homestay di Desa Bahoi yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut	Model usaha homestay di Desa Bahoi yang berkontribusi terhadap perlindungan laut terinisiasi	usaha	"- Peningkatan kapasitas pemilik homestay terkait pelayanan dan SOP - Peningkatan kapasitas berbahasa Inggris bagi pemilik homestay - Peningkatan kapasitas pemilik homestay terkait pemasaran - Peningkatan kapasitas pemilik homestay terkait keamanan dan keselamatan"	- Homestay di Bahoi dipasarkan untuk tamu internasional	-	-	-	150.000.000	IKI	Sulawesi Utara
41	YAPEKA SULAWESI UTARA	Tujuan 14. Ekosistem lautan	MENINGKATKAN PENDAPATAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN SECARA BERKELANJUTAN	Inisiasi model usaha budidaya spirulina di Desa Tarabitan yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut	Model usaha budidaya spirulina di Desa Tarabitan yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut terinisiasi	Usaha	"- Kerjasama penggunaan lahan untuk kolam spirulina - Workshop sosialisasi budidaya spirulina - Kolam budidaya spirulina terbangun"	"- Pelatihan pengelolaan budidaya spirulina - Pelatihan pasca panen budidaya spirulina - Pelatihan pemasaran spirulina"	-	-	-	70.000.000	IKI	Sulawesi Utara



Nama Organisasi: RARE Indonesia
Tujuan SDGs: SDG 14 - Ekosistem Lautan
Nama Program: Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)

Kegiatan/Ouput/Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan					Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
No	Kegiatan	Ouput		2022	2023	2024	2025	2026			
A. Indikator TPB/SDGs: 14.2.1 / Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan area lautan											
1	Desain area PAAP dengan memperhatikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan laut untuk nelayan	2. 13 jumlah dokumen PAAP	dokumen PAAP	0	0	2	5	6	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, Walton Foundation	11 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur. Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara,Bolaang Mongondouw Selatan)	
2.	Pembentukan wilayah PAAP	Terbentuknya wilayah PAAP	Hektar wilayah PAAP	0	0	17.46 9,2	43.673	52.407 ,6	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy		
3.	Pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL)	Terbentuknya Daerah Perlindungan Laut (DPL) dalam wilayah PAAP	Hektar Daerah Perlindungan Laut (DPL)	0	0	1.048 ,152	2.620,3 8	3.144, 456	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy	Sulut dan10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur. Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara,Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur. Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)
B. Indikator TPB/SDGs: 14.b.1* / Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
1	Peningkatan efektivitas tata kelola ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.	1. Panduan penerapan pendekatan PAAP di Sulawesi Utara	Jumlah panduan yang ditetapkan	1	1	0	0	0	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, GCF	a. Tingkat Nasional: Jakarta b. Tingkat Provinsi: Sulawesi Utara	Pemprov Sulut
		2. terintegrasinya pendekatan PAAP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi PAAP kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	6	14	3	5	6	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, GCF	Sulut dan10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur. Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara,Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur. Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)



Kegiatan/Ouput/Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan					Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
No	Kegiatan	Ouput		2022	2023	2024	2025	2026			
		3. Terbangunnya dan berfungsinya kerangka kelembagaan PAAP dan pencapaian SDG-14	Jumlah pertemuan dalam rangka penguatan lembaga bagi pengembangan PAAP dan pencapaian SDG-14	2	2	2	2	1	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, GCF	Sulut dan 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)
		4. Penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat	Jumlah kelompok pengawas di kawasan PAAP	0	0	13	0	0	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy	Sulut dan 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Utara, dan Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Utara, dan Bolaang Mongondouw Selatan)
			Jumlah pelatihan pengawas berbasis masyarakat.	0	0	6	7	0			
C.	Indikator TPB/SDGs: 14.b.1 (a) / Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										
	1. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan usaha mikro	1. Terbentuknya Kelompok Simpan Pinjam sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mengakses modal usaha bagi nelayan, pengolah dan pembeli ikan.	Jumlah kelompok simpan pinjam PAAP	0	10	0	0	0	Bloomberg	Kabupaten: 1. Kep. Sangihe 2. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 3. Minahasa Utara 4. Minahasa 5. Minahasa Tenggara 6. Bolaang Mongondow Timur 7. Minahasa Selatan 8. Bolaang Mongondow Utara 9. Bolaang Mongondow 10. Bolaang Mongondow Selatan	Jumlah kelompok simpan pinjam yang dibentuk di beberapa lokasi PAAP.



Kegiatan/Ouput/Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan					Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
No	Kegiatan	Ouput		2022	2023	2024	2025	2026			
		2. Terbangunnya kompetensi kelompok simpan pinjam dalam literasi keuangan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi kelompok simpan pinjam yang telah dibentuk.	0	10	0	0	0	Bloomberg	Kabupaten: 1. Kep. Sangihe 2. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 3. Minahasa Utara 4. Minahasa 5. Minahasa Tenggara 6. Bolaang Mongondow Timur 7. Minahasa Selatan 8. Bolaang Mongondow Utara 9. Bolaang Mongondow 10. Bolaang Mongondow Selatan	Kegiatan pendampingan bagi kelompok simpan pinjam yang telah dibentuk.
D. Indikator TPB/SDGs: 14.b.1 (b) / Jumlah nelayan yang terlindungi											
1.	Pembentukan Badan Pengelola yang Efektif	1. Terbentuknya kelompok PAAP yang terpilih	jumlah kelompok PAAP yang terbentuk	0	0	2	5	6	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, Walton Foundation	10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)	
2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	1. Terlindunginya akses masyarakat desa pesisir terhadap sumberdaya pesisir dan lautan	Jumlah desa pesisir	0	0	12	30	37	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy	Sulut dan 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)
			Jumlah nelayan pesisir	0	0	40	100	120	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy	Sulut dan 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)



Kegiatan/Ouput/Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan					Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
No	Kegiatan	Ouput		2022	2023	2024	2025	2026			
		2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan perubahan perilaku untuk membentuk kelompok nelayan PAAP	Jumlah kegiatan kampanye perubahan perilaku di tingkat provinsi dan lokasi PAAP terpilih.	1	5	3	5	7	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy	Sulut dan 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)
E	Indikator TPB/SDGs: 14.4 secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.										
1	Penyusunan Panduan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan	Tersedianya panduan/ aturan desa tentang pengelolaan perikanan dan habitat pesisir, rehabilitasi mangrove, terumbu karang, sea grassan desa tentang perikanan dan habitat pesisir, rehabilitasi mangrove, terumbu karang, sea grass	Jumlah aturan desa tentang perikanan dan habitat pesisir, rehabilitasi mangrove, terumbu karang, sea grassan desa tentang perikanan dan habitat pesisir, rehabilitasi mangrove, terumbu karang, sea grass	0	0	0	6	7		Desa-desa yang berada di kawasan PAAP terpilih di 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)	Perangkat desa yang berada di kawasan PAAP terpilih di 10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara, Bolaang Mongondouw Selatan)
2	Pengenalan dan pelaksanaan laporan hasil tangkapan oleh pembeli	Terbangunnya kompetensi pembeli dalam pelaksanaan laporan hasil tangkapan	Jumlah pelatihan penggunaan aplikasi digital.	0	6	10	10	0		10 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Utara, dan Bolaang Mongondouw Selatan)	Pemprov Sulut dan 10 Pemkab pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Utara, dan Bolaang Mongondouw Selatan)





BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Indonesia.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi penguatan kerja sama multipihak, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.



Untuk aspek **Kerangka Hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 296 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2026 yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya. Sementara itu, tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2018.

Dalam aspek **Substansi Program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek **Pendanaan** perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik. Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

